

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA JEDONG, KECAMATAN  
WAGIR-KABUPATEN MALANG DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN METERISASI AIR BERBASIS PARTISIPASI  
MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya**

**VERRA RATIH KRISWAHYUNI**

**NIM. 115030101111105**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2017**

**MOTTO**

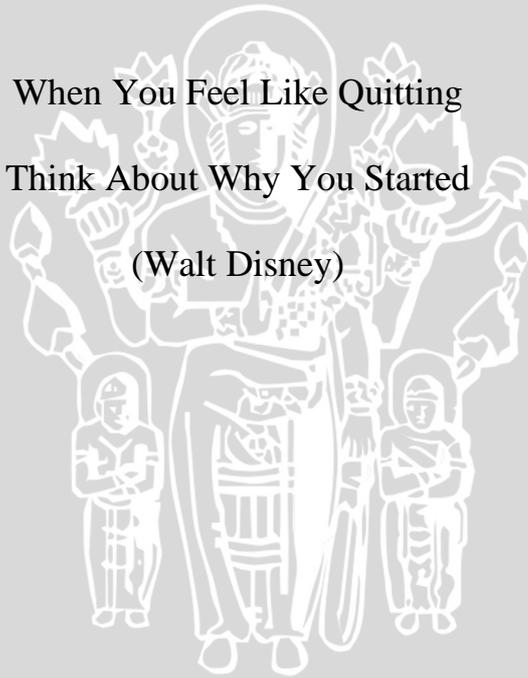
The Best Way To Get Something Done

Is To Begin

When You Feel Like Quitting

Think About Why You Started

(Walt Disney)



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Jedong, Kecamatan Wagir,  
Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Pembangunan Meterisasi  
Air Berbasis Partisipatif

Disusun oleh : Verra Ratih Kriswahyuni

NIM : 115030101111105

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 24 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



**Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS**  
NIP. 19540704 198103 1003

Anggota



**Drs. Stefanus Poni Rengu, M.AP**  
NIP. 19750130 200312 1 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 5 Oktober 2016



Nama : Verra Ratih Kriswahyuni

NIM : 115030101111105

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 8 November 2016  
Jam : 10:00 WIB  
Skripsi atas nama : Verra Ratih Kriswahyuni  
Judul : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Jedong, Kecamatan Wagir,  
Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Pembangunan Meterisasi Air  
Berbasis Partisipasi Masyarakat

Dan dinyatakan LULUS

### MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing



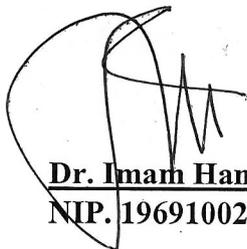
**Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS.**  
NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota Komisi Pembimbing



**Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP.**  
NIP. 19531113 198212 1 001

Penguji I



**Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS.**  
NIP. 19691002 199802 1 001

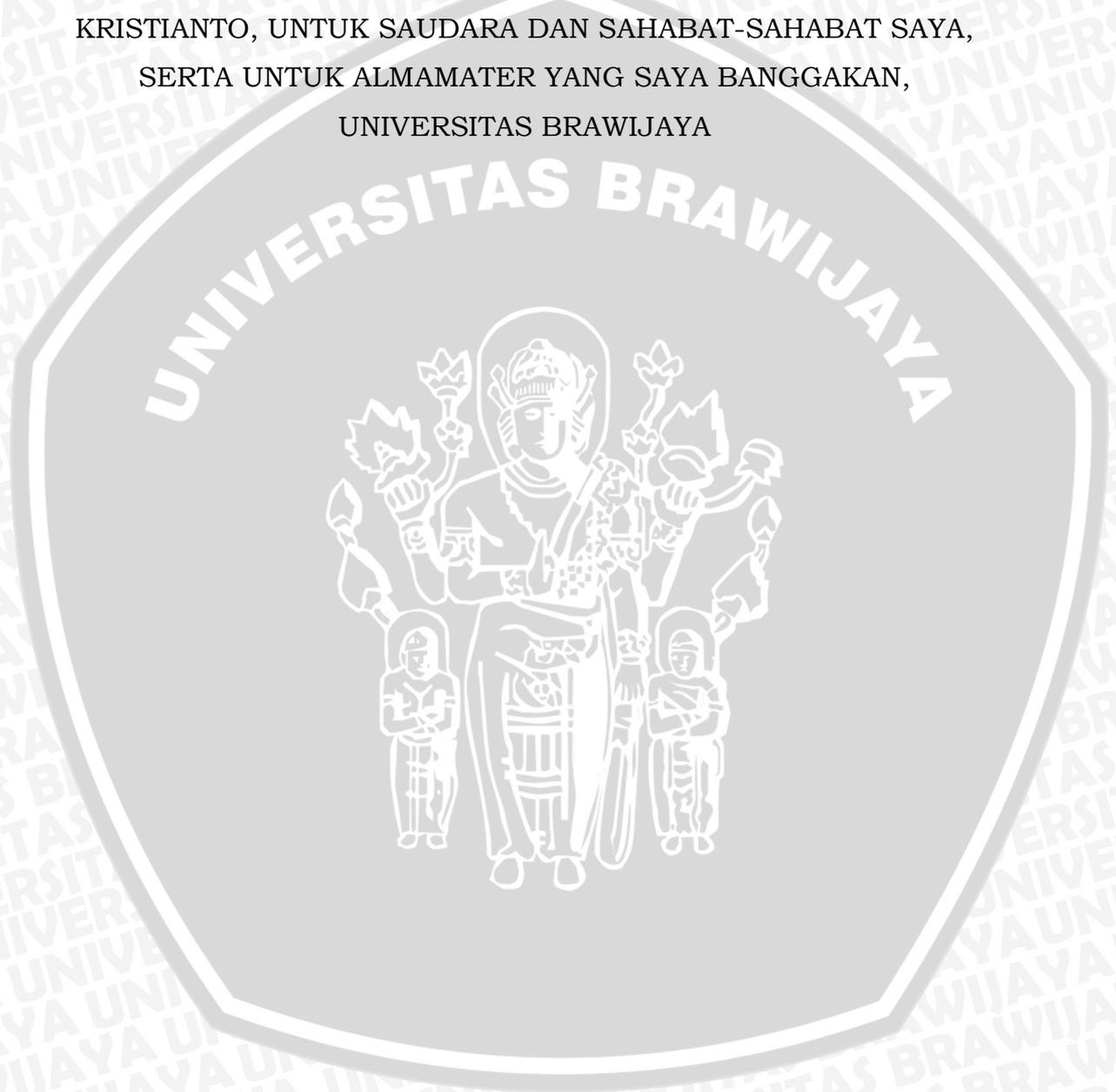
Penguji II



**Ainul Hayat, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19730713 200604 1 001

## LEMBAR PERSEMBAHAN

TULISAN INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK ORANG TUA  
TERCINTA, IBU NURUL WAHYUNI DAN BAPAK GATOT  
KRISTIANTO, UNTUK SAUDARA DAN SAHABAT-SAHABAT SAYA,  
SERTA UNTUK ALMAMATER YANG SAYA BANGGAKAN,  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## RINGKASAN

Verra Ratih Kriswahyuni, 2016, *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS dan Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP, Universitas Brawijaya, 138 Hal + xv

Gaya Kepemimpinan adalah perilaku yang digunakan oleh seseorang untuk mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Seorang Kepala Desa merupakan pemimpin dalam pemerintahan desa yang memiliki pengaruh untuk mendorong atau mengarahkan masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan gaya kepemimpinan yang sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Seperti pada Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang memiliki masalah dalam hal distribusi air bersih bagi warganya. Hal itu dikarenakan oleh beberapa hal seperti, jauhnya akses sumberdaya air, tidak adanya sarana dan prasarana yang mencukupi, dan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pendistribusian air. Oleh karena itu, perlu adanya seorang pemimpin yang mampu mengoordinasi serta mengajak masyarakat Desa Jedong untuk berpartisipasi dalam pembangunan meterisasi air, sehingga distribusi air merata untuk kebutuhan warga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis gaya kepemimpinan Kepala Desa Jedong dalam pelaksanaan pembangunan meterisasi air sebagai sarana pengadaan air bersih desa, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meterisasi air, dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Fokus penelitian ini adalah gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan meterisasi air, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemimpin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pembangunan Meterisasi Air merupakan program yang dibuat oleh kepala desa dan proses pembangunannya merupakan swadaya dari masyarakat. Program tersebut telah terlaksana dengan cukup baik di tahun 2014 dan hingga sekarang masih berjalan. Realiasi program berjalan baik dengan adanya keterlibatan Kepala Desa beserta perangkatnya. Masyarakat seluruhnya memberikan tanggapan yang positif terhadap program ini dikarenakan memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Jedong yang demokratis juga mampu mendorong dan memotivasi warga sehingga turut serta dalam program pembangunan ini.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Meterisasi Air

## SUMMARY

Verra Ratih Kriswahyuni, 2016, *Leadership style of Jedong Village Chief, Wagir Sub-district Malang in Implementation of Participatory Based Water Metering Development*, Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS and Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP, Brawijaya University, 138 Hal + xv

Leadership style is the behavior of someone in order to persuade others behavior. Village Chief is a leader in the village administration that has influence to motivating or directing society in the development so as to foster public participation in it. Therefore we need the appropriate leadership style in carrying out its duties and functions as the head of the village. As in Jedong Village, Wagir Sub-district Malang who have problems in terms of distribution of clean water to its citizens. It was caused by several things like, away access to water resources, the lack of adequate facilities and infrastructure, and the amount of fraud occurring in the distribution of water. Therefore, it is necessary to choose a leader who is able to coordinate and invite the community to participate in the village Jedong Metering construction of water, so that the distribution of water fulfill the needs of citizens.

The purpose of this study is to discover, describe, and analyze the leadership style of Jedong Village Chief in implementation of water metering development as a clean water supply facility of the village, as well as to identify and describe the forms of public participation in the development process water metering, and to describe the constraints faced in improving community participation. Researcher used descriptive research with a qualitative approach. The data obtained through an observation, interviews and documentation in the field. The focus of this research is the leadership style of village chief in the water metering development, forms of public participation, and the constraints faced by leader to enhance community participation. Analysis of the data used is the Miles and Hubberman data analysis.

The result of this study indicate that the Water Metering Development Program is a program created by the village head and the construction process is self-supporting community. The program has done quite well in 2014 and until now still running. The realization of the program goes well with their involvement of their village chief. The whole society give a positive response to this program because of their ease in fulfilling their daily water needs. The democratic leadership style used by the Jedong Village Chief also able to encourage and motivate people to participate in this development program.

Keywords: Leadership Style, Society Participation, Water Metering.

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipatif”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

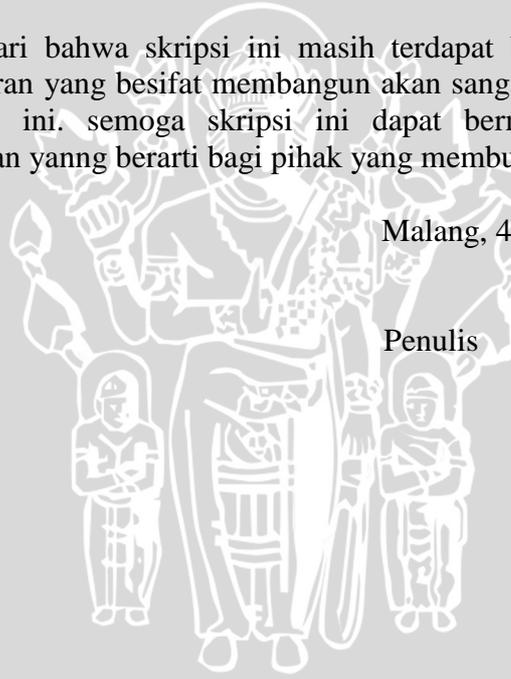
1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, beserta dengan semua perangkat desa yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
8. Seluruh panitia pembangunan meterisasi air di Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang telah bersedia menjadi narasumber dan membagi ilmu kepada penulis.
9. Warga Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Bapak Gatot Kristianto dan Ibu Nurul Wahyuni, selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan doa dan dukungan moral serta dukungan materi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
11. Kusuma Manik Cahyaning, selaku adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama penyusunan skripsi.

12. Richard Andreas Luturmas, S.I.Kom. yang telah memberikan doa dan dukungan serta yang selalu menjadi *moodbooster* kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
13. Sahabat-Sahabat penulis, Cholisah Novitasari, Yeni Rachmawati, dan Dessy Kurnia yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi
14. Sahabat-Sahabat penulis, Asyita Amaliyah, Dela Cornelia, Dian Novita, Elisna Asri, Resha Rizky, dan Tika Dewi yang telah mendengarkan curhatan penulis dan memotivasi penulis selama proses penyusunan skripsi.
15. Sahabat-Sahabat penulis selama perkuliahan, Sari Dewi, Ikrom Laily, Bintang Aldini, Septian Dwi Rizka, Asna Ullya, Nurlita Pravitasari, A. Krisna Setiawan, dan Nike Virginia yang memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
16. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Oktober 2016

Penulis



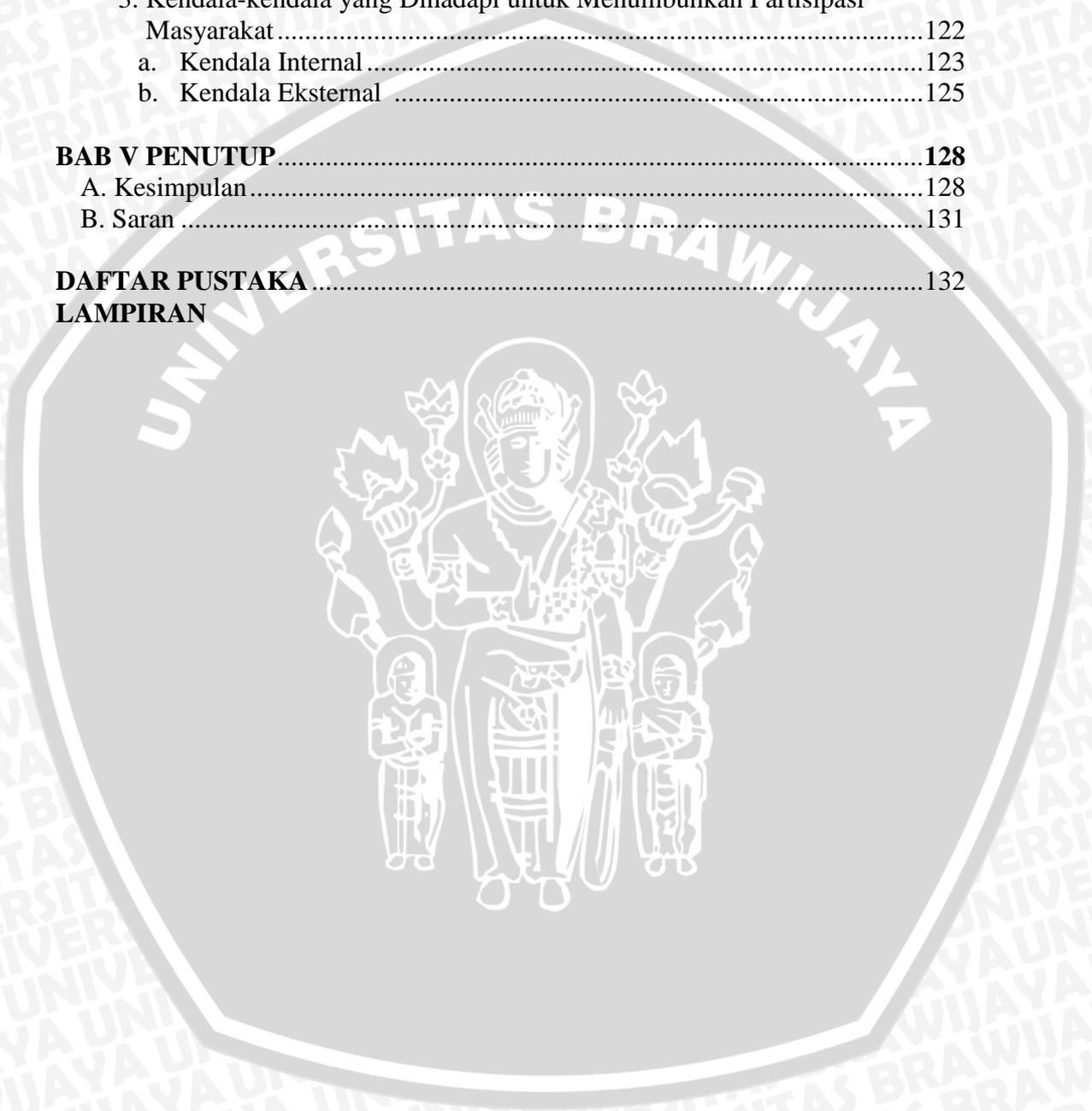
## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Administrasi Publik	
1. Pengertian Administrasi Publik .....	13
2. Hubungan antara Administrasi Publik, Organisasi Publik, dan Kepemimpinan .....	14
B. Kepemimpinan	
1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan.....	16
2. Tugas dan Fungsi Kepemimpinan .....	18
3. Teori-teori Kepemimpinan.....	25
4. Gaya Kepemimpinan .....	33
C. Pembangunan Desa	
1. Asas, Prinsip, dan Strategi Pembangunan Desa.....	37
2. Ruang Lingkup Pembangunan Desa .....	40
D. Partisipasi Masyarakat	
1. Konsep Partisipasi.....	41
2. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program Pembangunan .....	43
3. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat .....	45
E. Sumber Daya Air	
1. Air sebagai Kebutuhan Dasar Manusia.....	48
2. Masalah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Fokus Penelitian.....	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	55



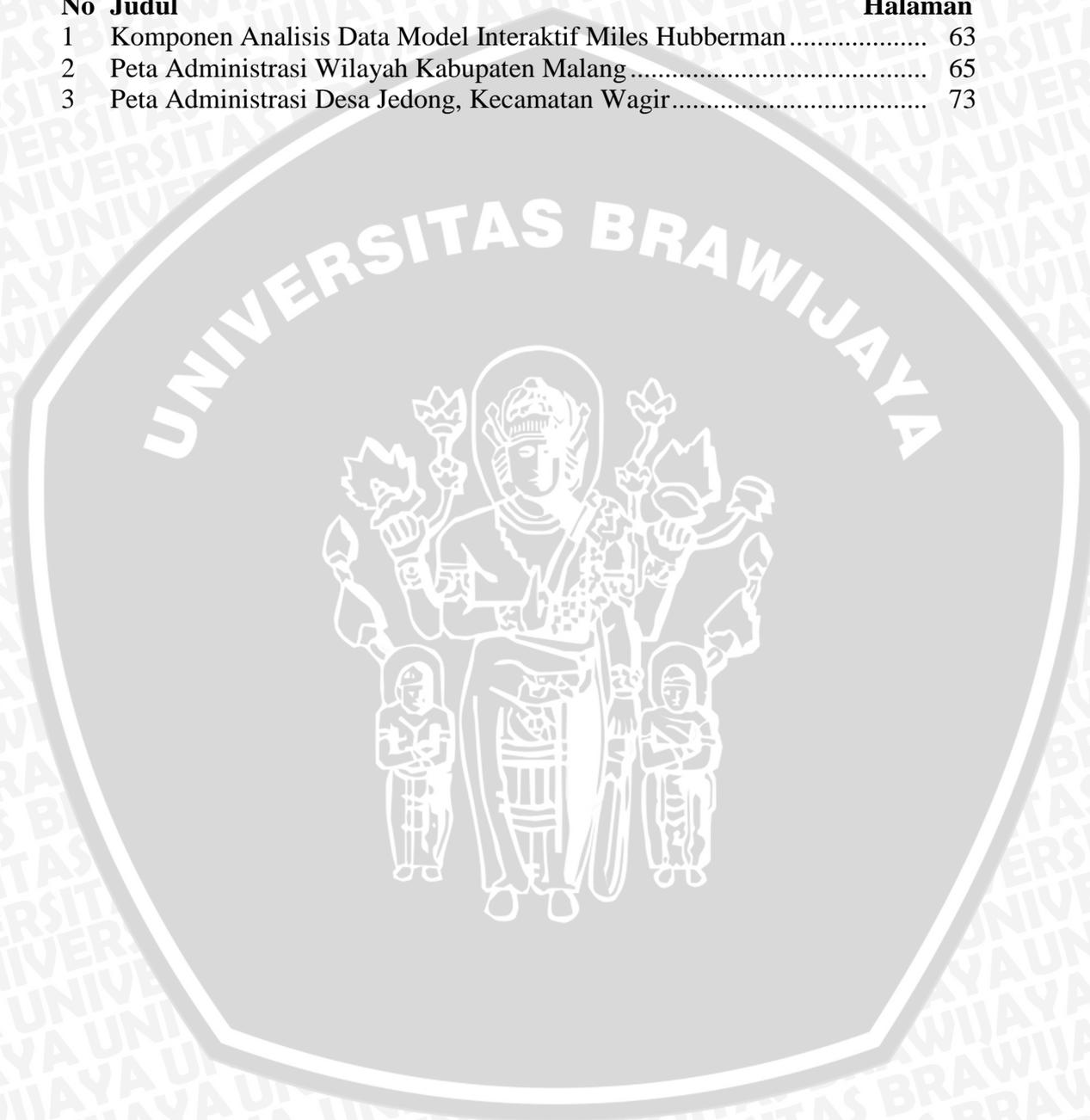
D. Jenis dan Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Instrumen Penelitian.....	59
G. Analisis Data.....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang .....	65
2. Gambaran Umum Desa Jedong .....	73
B. Penyajian Data .....	75
1. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipatif .....	75
a. Pemberian pengarahan program pembangunan meterisasi air kepada perangkat desa dan masyarakat setempat .....	76
b. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kepada perangkat desa dan masyarakat setempat .....	79
c. Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat setempat .....	82
d. Pemberian pengawasan kepada panitia pelaksana pembangunan meterisasi air .....	85
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Meterisasi Air .....	87
a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan program pembangunan meterisasi oleh kepala desa .....	88
b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan meterisasi air .....	91
c. Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat pembangunan meterisasi air .....	93
d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan meterisasi air .....	95
3. Kendala-kendala yang Dihadapi untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat .....	97
C. Pembahasan .....	100
1. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipatif .....	100
a. Pemberian pengarahan program pembangunan meterisasi air kepada perangkat desa dan masyarakat setempat .....	102
b. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kepada perangkat desa dan masyarakat setempat .....	104
c. Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat setempat ...	108
d. Pemberian pengawasan kepada panitia pelaksana pembangunan meterisasi air .....	110
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Meterisasi Air .....	112
a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan program pembangunan meterisasi oleh kepala desa .....	115
b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan meterisasi air .....	116

c. Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat pembangunan meterisasi air .....	117
d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan meterisasi air .....	119
3. Kendala-kendala yang Dihadapi untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat .....	122
a. Kendala Internal .....	123
b. Kendala Eksternal .....	125
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



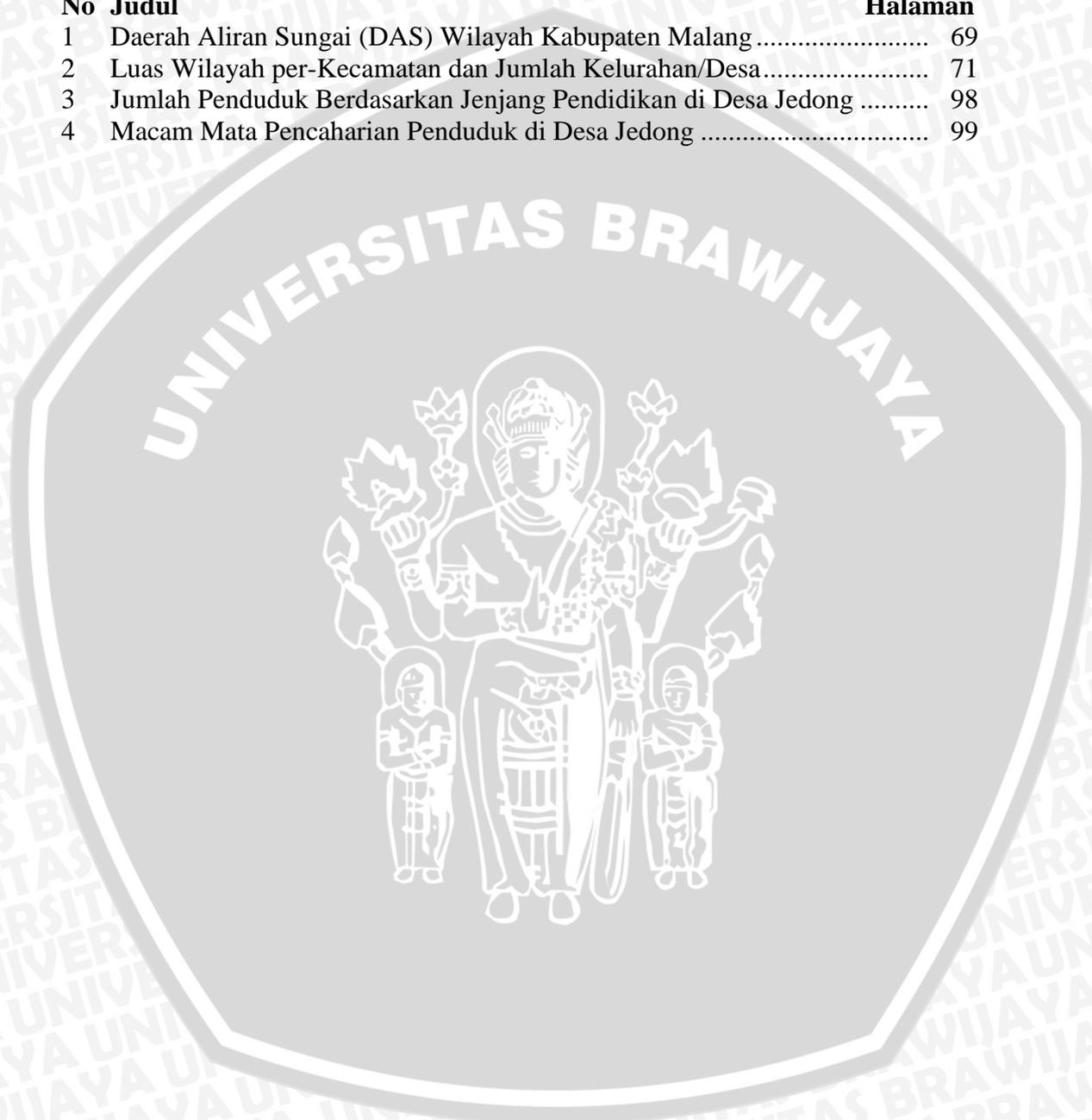
## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles Hubberman.....	63
2	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Malang.....	65
3	Peta Administrasi Desa Jedong, Kecamatan Wagir.....	73



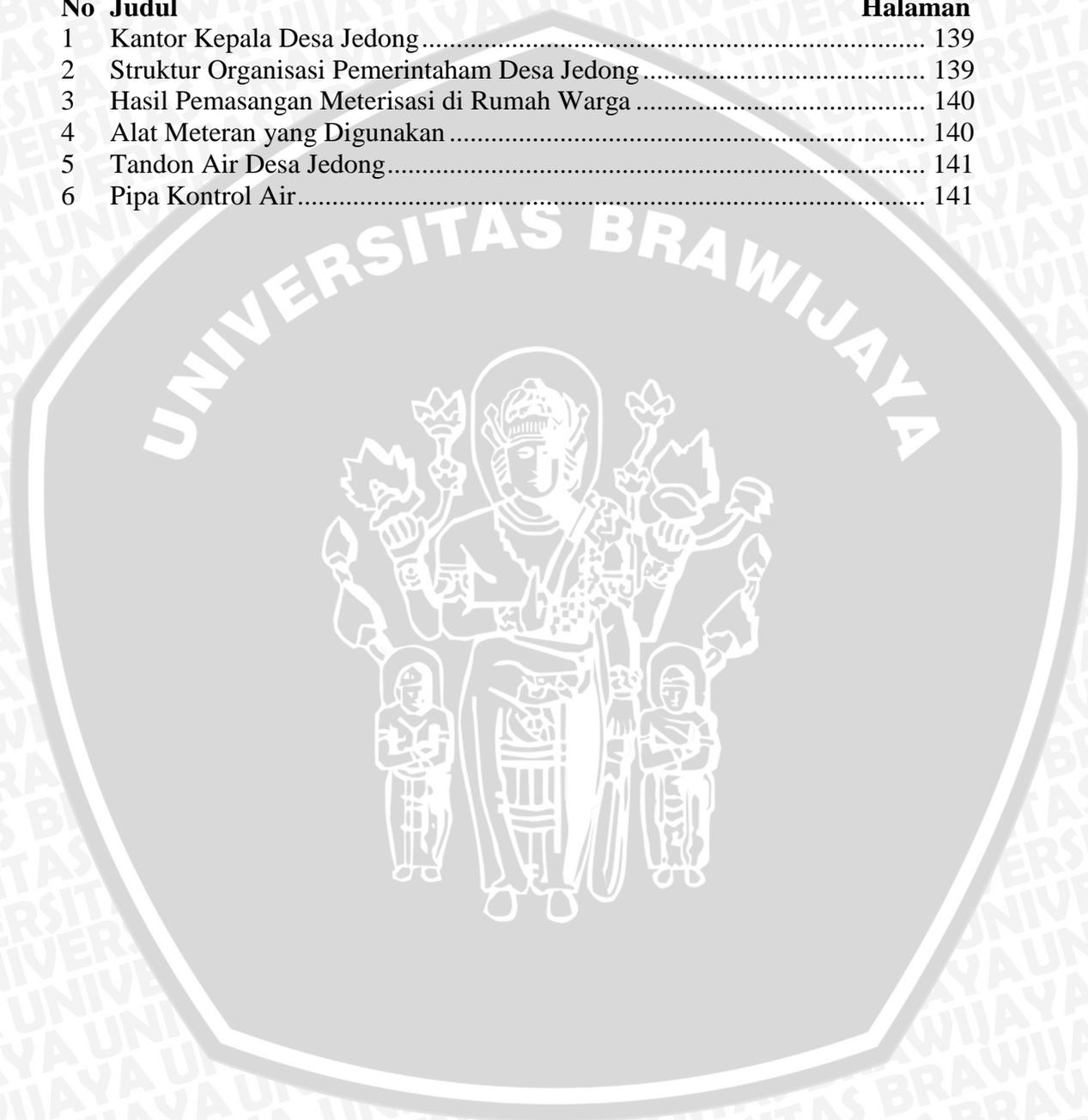
**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Malang.....	69
2	Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa.....	71
3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Desa Jedong .....	98
4	Macam Mata Pencaharian Penduduk di Desa Jedong .....	99



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Kantor Kepala Desa Jedong.....	139
2	Struktur Organisasi Pemerintaham Desa Jedong.....	139
3	Hasil Pemasangan Meterisasi di Rumah Warga .....	140
4	Alat Meteran yang Digunakan .....	140
5	Tandon Air Desa Jedong.....	141
6	Pipa Kontrol Air.....	141



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang keberadaannya dijamin dalam konstitusi yaitu Pasal 33 ayat 3, yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dalam konstitusi tersebut jelas bahwa air merupakan salah satu sumberdaya terpenting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan air juga mengalami banyak kesulitan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmerataan ketersediaan air antara daerah yang satu dengan daerah lainnya yang menyebabkan distribusi air di daerah satu dengan yang lainnya terhambat dan juga disebabkan oleh rendahnya pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Distribusi air yang terhambat tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu semakin berkurangnya daerah tangkapan air dikarenakan adanya pembangunan yang terus menerus dan atau adanya pengelolaan yang tidak baik dalam pendistribusian air bersih tersebut sehingga menyebabkan masyarakat harus rela untuk tidak terdistribusi air dengan baik. Lemahnya pengelolaan air yang

dilakukan oleh pihak-pihak terkait dikarenakan oleh beberapa masalah dalam pengelolaannya seperti antara lain: adanya fragmentasi pengelolaan antar instansi pemerintah dan sulitnya koordinasi antar berbagai instansi di dalamnya, pengelolaan sumberdaya air masih terbatas pada orientasi sisi penyediaan semata bukan pada sisi kebutuhan, borosnya pemakaian air untuk pertanian karena rendahnya efisiensi pemakaian air di sektor pertanian, organisasi pengelolaan sumberdaya air masih tersentralisasi di pusat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya air di satu sisi dan di sisi lain masih belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam organisasi pengelolaan sumberdaya air (Sanim, 2011:18-19). Untuk itu diperlukan suatu pemahaman bahwa pengelolaan yang baik terhadap sumber daya air akan dapat memenuhi kebutuhan air bagi seluruh masyarakat.

Pengelolaan sumberdaya air yang baik hendaknya dilakukan oleh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota. Hal tersebut jelas dikarenakan sejak diberlakukannya UU otonomi daerah pertama UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi dan pemerintah daerah, maka mulai saat itulah kesempatan yang luas diberikan pula kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki di daerahnya, termasuk sumberdaya air. Pengelolaan sumberdaya akan lebih efektif dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja namun juga oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi didalamnya. Masyarakat dianjurkan untuk turut ikut serta dalam pengelolaan dikarenakan masyarakat tersebut sendiri yang mengerti mengenai seberapa besar kebutuhan akan air dan ketersediaan air yang ada di lingkungan yang ditinggalinya.

Masyarakat tidak akan mau bergerak dengan aktif melakukan pengelolaan apabila tidak ada salah seorang yang mampu untuk mendorong dan menggerakkan mereka. Disinilah dibutuhkan seorang pemimpin didalam masyarakat itu untuk memotivasi agar masyarakat turut berpartisipasi di dalam rencana atau program pengelolaan air. Pemimpin disini adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan sehingga mampu untuk mempengaruhi orang lain agar bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya satu atau beberapa tujuan (Arifin, 2016:1). Sukses atau tidaknya suatu kegiatan dalam organisasi juga ditentukan oleh sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpinnya, tak terkecuali juga dalam organisasi publik yaitu Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014, pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa. Sesuai pula dengan UU nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 2 bahwa kepala desa memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu gaya kepemimpinan yang baik.

Gaya kepemimpinan itu sendiri adalah perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, (Thoah, 2010:49). Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh untuk menentukan suatu kebijakan strategis dalam organisasi yang bersangkutan, sehingga dianggap perlu untuk dimiliki setiap pemimpin untuk mendorong atau mengarahkan organisasi dibawah pimpinannya. Perilaku mau mendorong dan mengarahkan

tersebut yang nantinya dapat menumbuhkan sifat partisipasi oleh masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan sarana untuk mengelola sumberdaya air di desa sangatlah penting dikarenakan air sudah menjadi suatu kebutuhan vital bagi masyarakat yang akan terus menerus digunakan setiap harinya. Akan tetapi keberadaan air kian hari makin langka sedangkan jumlah penduduk makin hari makin bertambah dan kebutuhan akan air makin meningkat. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa air adalah anugerah Tuhan tidak patut diberi harga, mengakibatkan air dipersepsikan sebagai komoditas gratis sehingga pemakaiannya pun tidak efisien (Sanim, 2011:55), oleh karena itu peningkatan efisiensi penggunaan perlu mendapat prioritas dari pihak dan instansi yang berkepentingan.

Kondisi memprihatinkan terlihat apabila desa yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan luas tanah persawahan yang besar namun masih bermasalah terhadap pemenuhan akan kebutuhan air bersih untuk hidup sehari-hari. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti akses sumberdaya air yang terlalu jauh atau kurangnya sarana untuk mengalirkan air ke rumah-rumah warga seperti pembangunan tandon untuk menampung air, pipanisasi untuk mengalirkan air, serta ada atau tidaknya meterisasi air untuk mengukur penggunaan air dalam tiap rumahtangga agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan seperti pendistribusian yang tidak merata antara warga satu dengan yang lain. Kondisi seperti ini masih terlihat pada salah satu desa di Kabupaten Malang, Kecamatan Wagir, yaitu Desa Jedong.

Desa yang bagian timurnya berbatasan langsung dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun, Kota Malang ini memiliki kemudahan akses jalan dan berbagai potensi sumberdaya alam yang belum banyak tergali. Banyaknya bangunan pabrik seperti pabrik kerupuk, rokok, pembuatan dupa, pabrik wallet, serta persawahan milik warga menuntut agar pembangunan sarana dan prasarana untuk kebutuhan air di Desa Jedong agar lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat kondisi yang memprihatinkan ketika penyaluran sumber daya air di desa ini belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Faktor geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Wagir yang berada di wilayah dataran tinggi dan diantara lereng Gunung Kawi seharusnya memungkinkan ketersediaan sumberdaya air yang melimpah di daerah ini, khususnya di Desa Jedong. Namun hal tersebut belum terlihat dengan baik.

Pada Desa Jedong sendiri, kebutuhan air warganya diambil dari sumber mata air yang secara langsung dialirkan kerumah-rumah warga yang terlebih dahulu telah disimpan ke dalam tandon. Untuk mengurangi dampak negatif pengambilan air yang berlebihan atau tidak meratanya pendistribusian air bersih, maka pemerintah desa setempat membangun tandon sehingga air dapat dialirkan ke rumah warga secara langsung dan membuat pipanisasi dari sumber air ke rumah-rumah warga. Dengan adanya pembangunan tandon tersebut maka air mengalir mulai dari pukul 06.00 pagi hingga pukul 09.00 pagi. Waktu tersebut adalah kesempatan warga untuk menampung air guna memenuhi kebutuhan air dalam sehari.

Program pembangunan sarana dan prasarana untuk kebutuhan air di Desa Jedong pada dasarnya telah diusulkan kedalam sebuah program rencana kerja kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan Wagir pada tahun 2014 yang meliputi pembangunan pipanisasi dan drainase air dengan catatan sangat mendesak. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan dalam rangka pengelolaan air bersih di Desa Jedong masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri, dikarenakan pengelolaan air bersih pada desa tersebut masih tergolong minim, sedangkan air merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting digunakan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pembangunan pipanisasi yang telah dilakukan sebelumnya tidaklah berjalan dengan lancar dan banyak terjadi kecurangan seperti pembeloran pipanisasi oleh warga tertentu untuk keperluan irigasi. Akibatnya pemenuhan air bagi rumah tangga terkadang mengalir hanya sedikit dan dalam waktu yang singkat. Berbagai keluhan warga itulah yang mendorong Kepala Desa Jedong akhirnya membuat kebijakan meterisasi air yang dilakukan bertahap dari dusun ke dusun sehingga tidak ada lagi kecurangan dalam pengambilan air. Dengan meterisasi ini nantinya penggunaan air warga dapat diukur sehingga kecurangan seperti pada saat pengadaan pipanisasi tidak terjadi lagi.

Pembangunan meterisasi ini pelaksanaannya sudah dimulai sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang. Proses pelaksanaannya dilakukan atas program dari kepala desa sesuai dengan adanya musyawarah yang dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan untuk

pembangunannya sendiri dilakukan dengan swadaya dari masyarakat desa setempat. Pemerintah Desa Jedong beserta perangkatnya mengusulkan pembangunan meterisasi air sebagai sarana untuk pemenuhan air bersih agar dapat memudahkan masyarakat dalam hal pengambilan air bersih untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pembangunan sarana air bersih ini tengah berlangsung dan sesuai program dari kepala desa akan dibangun di tiap-tiap dusun.

Program pembangunan meterisasi air ini terlaksana pada periode kedua masa pemerintahan Kepala Desa Jedong yaitu pada tahun 2013-2018. Hal tersebut menjadi menarik ketika Kepala Desa Jedong dalam kepemimpinan periode sebelumnya yang sudah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam program-program pembangunan fisik bagi Desa Jedong seperti pembangunan tembok penahan tanah batas desa dan pengaspalan jalan desa, namun masih belum dapat sepenuhnya mengajak masyarakat turut ikut serta di dalamnya. Berbeda pada program meterisasi air ini terlihat bahwa kepemimpinannya melibatkan masyarakat setempat dan berbasis partisipatif di dalamnya. Untuk melibatkan partisipasi masyarakat Desa Jedong memang tidaklah mudah karena berkaitan dengan budaya, pendidikan dan pendapatan masyarakatnya yang terkadang cenderung menjadi kendala dalam menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan desa.

Sesuai dengan hal tersebut maka penting diperlukan sosok pemimpin yang mampu mendorong, memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta terlibat didalam pembangunan. Dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat desa setempat memungkinkan keberhasilan dari pelaksanaan program

pembangunan, selain itu juga masyarakat merupakan salah satu factor penting dalam pembangunan desa sebab masyarakat yang mendiami desa itulah yang mengerti apa saja kebutuhan dan kepentingan-kepentingan warga yang mendesak serta mampu memahami pula bagaimana kondisi yang ada dalam desa tersebut baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, hingga geografis desa.

Untuk itulah penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki gaya kepemimpinan yang baik agar dalam pelaksanaannya dapat mengoordinasi dan mengajak serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalamnya. Dalam konteks inilah gaya kepemimpinan Kepala Desa Jedong yang berbasis partisipatif diperlukan dalam pelaksanaan program pembangunan meterisasi. Mampu tidaknya Kepala Desa Jedong dalam memimpin nanti akan terlihat apabila gaya kepemimpinannya dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat setempat.

Sesuai dengan hal tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam memimpin pelaksanaan program pembangunan meterisasi air dan mampu menumbuhkan sikap partisipasi dari masyarakat maka sebagai tindak lanjut peneliti tertarik untuk meneliti gaya kepemimpinan Kepala Desa Jedong dengan judul **“Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipatif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil antara lain :

1. Bagaimana Gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Meterisasi Air sebagai Sarana Pengadaan Air Bersih di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan meterisasi air di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?
3. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Jedong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan meterisasi air ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis gaya kepemimpinan Kepala Desa Jedong dalam pelaksanaan pembangunan meterisasi air sebagai sarana pengadaan air bersih desa.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis apa saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sarana air bersih di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Jedong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam pembangunan meterisasi air.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

##### **1. Kontribusi Akademis**

Untuk menambah dan memperkaya bahan kepustakaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kebijakan sehingga mampu dijadikan referensi untuk bidang studi serta dapat digunakan untuk pustaka bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam hal pembangunan sarana dan prasarana khususnya dalam hal pengairan dan khususnya sebagai pedoman dalam upaya yang akan dilakukan selanjutnya bagi pemerintah Desa Jedong. Serta bagi masyarakat agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembangunan sarana dan prasarana di Desa Jedong.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membaginya kedalam lima bab dan dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab, dimana antara bab dan sub-bab memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Adapun pokok pembahasan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai teori-teori yang digunakan untuk dijadikan landasan teoritik dari penelitian dan digunakan sebagai alat untuk analisis, konsep-konsep yang digunakan antara lain : 1) administrasi publik, 2) pembangunan desa, 3) kepemimpinan, 4) partisipasi masyarakat dan 5) sumber daya air.

## BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai yang meliputi antara lain, jenis penelitian, mengenai lokasi dan situs dari penelitian, mengenai fokus penelitian, mengenai sumber data dan teknik pengumpulan data, dan mengenai analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai uraian hasil temuan-temuan penelitian berupa data-data yang diperoleh dari wawancara,

dokumentasi, dan arsip-arsip instansi terkait yang kemudian diolah, dianalisis, dan dipaparkan kemudian dikaitkan dengan teori yang ada dalam bab dua.

## BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi Publik

Banyak ahli yang telah mendefinisikan administrasi publik atau administrasi negara diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Dwight Waldo dalam Syafii (2003:33), administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
- b. Pfiffner dan Presthus dalam Syafri (2012:20), administrasi publik adalah suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik.
- c. Rosenbloom dan Goldavan dalam Syafri (2012:20), administrasi publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudisial dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan masyarakat.
- d. Menurut Woodrow Wilson dalam Syafri (2012:21), administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai

dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha swasta atau privat.

- e. Menurut Sondang P. Siagian dalam Syafri (2012:25), administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan negara.

Melihat pengertian administrasi publik dari beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama dari organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

## **2. Hubungan Antara Administrasi Publik, Organisasi Publik, dan Kepemimpinan**

Organisasi publik menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2) adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik ini berkenaan dengan proses pengorganisasian yang dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam organisasi. Organisasi publik ini adalah suatu wadah dari administrasi

publik untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuannya sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat akan dapat terwujud apabila ada kerjasama di dalamnya, baik menyangkut kerjasama di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Proses kerjasama organisasional tersebut dapat terwujud dikarenakan ada suatu ilmu yang mempelajari dan menelaahnya, yaitu ilmu administrasi (Silalahi, 1997:11). Dimensi cakupan ilmu administrasi ini sangat luas meliputi organisasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara administrasi, kepemimpinan dan organisasi sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal tersebut terlihat dalam pengertian administrasi publik yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan negara. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan suatu wadah untuk menampung semua aspirasi, dan seluruh kegiatan kerjasama didalamnya agar tujuan dapat tercapai, wadah tersebut merupakan organisasi publik seperti pemerintahan. Sedangkan untuk menjalankan organisasi tersebut diperlukan suatu pemimpin didalamnya yang bertugas mengkomunikasikan tujuan organisasi dan melakukan

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keberhasilan dari tujuan organisasi tersebut.

## B. Kepemimpinan

### 1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan

Konsep “pemimpin” berasal dari kata asing “*leader*” dan “kepemimpinan berasal dari “*leadership*”. Ada banyak definisi mengenai pemimpin, antara lain:

Menurut Henry Pratt Fairchild dalam Arifin (2016:1), dalam arti luas pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Sedangkan dalam arti sempit berarti seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansi (penerimaan) secara sukarela oleh pengikutnya.

Menurut Kartono dalam Pasolong (2008:2), bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Lantu dalam Pasolong (2008:3), pemimpin dalam era *post modern* adalah pelayan. Hal ini terjadi karena seharusnya pemimpin adalah melayani bukan dilayani.

Berbeda halnya dengan pemimpin, kepemimpinan sendiri memiliki suatu pengertian yaitu kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengaruh kepemimpinan

tersebut dapat secara formal terjadi pada suatu organisasi dikarenakan posisi yang dipegang pada suatu organisasi tersebut. Definisi mengenai kepemimpinan banyak sekali dikemukakan oleh ahli antara lain:

Menurut George R. Terry dalam Arifin (2012:3), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok.

Menurut Howard H. Hoyt dalam Arifin (2012:3), kepemimpinan berarti suatu seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia atau kemampuan untuk membimbing orang.

Yukl dalam Pasolong (2008:4), mendefinisikan kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau birokrasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan *teamwork*, serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang berada diluar kelompok atau organisasi.

Hersey dan Blanchard dalam Pasolong (2008:5), menyebut bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kepemimpinan adalah fungsi pemimpin, pengikut, dan variabel situasional lainnya.

Berdasarkan pengertian kepemimpinan diatas maka dapat dikatakan bahwa suatu kepemimpinan dapat menjadi bermakna apabila mampu membuat perbedaan dalam organisasi atau kelompok yang dia

pimpin. Prinsip sebagai pendukung perilaku kepemimpinan dibutuhkan untuk memberikan pengaruh yang kuat dalam membangun dirinya sendiri sebagai pemimpin dan membangun organisasi yang dipimpinnya. Arifin (2012:5) mengatakan bahwa prinsip merupakan suatu sumber utama pendukung kehidupan yang ditampilkan kedalam empat dimensi seperti, keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Sedangkan menurut Covey dalam Arifin (2012:6) karakteristik seorang pemimpin itu berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain:

- a. Seseorang yang belajar seumur hidup  
Seorang pemimpin tidak hanya belajar melalui pendidikan formal saja namun juga mampu belajar melalui hal-hal lain seperti membaca, menulis, observasi, mendengar, serta memiliki pengalaman baik dan buruk sebagai sumber pembelajaran untuk menjadi lebih baik.
- b. Berorientasi pada pelayanan  
Seorang pemimpin bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan bersama. Dalam memberikan pelayanan pun hendaknya pemimpin harus berprinsip mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
- c. Seorang pemimpin harus dapat bekerja untuk jangka waktu yang relatif lama dan dalam kondisi tidak ditentukan. Tugas dan Fungsi Kepemimpinan

## **2. Tugas dan Fungsi Kepemimpinan**

Tugas pemimpin dalam suatu organisasi sangat penting dalam hal pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama oleh anggota atau kelompok organisasi. Hicks dan Gullet dalam Pasolong (2008:20) mengatakan bahwa pimpinan dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dan pencapaian

tujuan organisasi. Tanpa adanya pemimpin tidak ada yang namanya bimbingan dan hubungan organisasi dengan individu menjadi lemah, sebab tidak ada yang memberikan perintah atau keputusan.

Tugas kepemimpinan menurut Pasolong meliputi dua hal utama yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan diantara orang-orang yang dipimpinnya. Lebih lanjut Keating dalam Pasolong (2008:21-22), mengatakan bahwa terdapat beberapa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok antara lain:

- a. Memulai (*initiating*), yaitu usaha agar kelompok memulai suatu kegiatan atau gerakan tertentu.
- b. Mengatur (*regulating*), yaitu tindakan untuk mengatur arah kegiatan dan langkah yang dilakukan oleh kelompok.
- c. Memberitahu (*informating*), yaitu memberikan informasi, data, fakta, dan pendapat apabila para anggota meminta dan memerlukannya.
- d. Mendukung (*supporting*), yaitu suatu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawahan dan menyempurnakannya dengan cara menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam penyelesaian tugas bersama.
- e. Menilai (*evaluating*), yaitu suatu tindakan untuk menguji gagasan atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi-konsekuensi serta untung ruginya dari tindakan tersebut.
- f. Menyimpulkan (*summarising*), yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat, atau usul yang muncul lalu menyingkat dan menyimpulkannya sebagai landasan untuk pemikiran lebih lanjut.

Selain memiliki tugas, kepemimpinan juga memiliki fungsi seperti yang dinyatakan Siagian dalam Pasolong (2008:23-30), adalah:

1. Pimpinan sebagai penentu arah, yaitu setiap organisasi atau birokrasi dibentuk sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya jangka panjang atau jangka pendek. Tujuan dalam organisasi tersebut tidak akan tercapai apabila masing-masing anggota bertindak sendiri-sendiri tanpa ditentukan arah dari pimpinan. Arah yang dimaksudkan adalah strategi dan taktik yang telah disusun dan dijabarkan oleh birokrasi tersebut. Keputusan yang diambil oleh pemimpin sebagai penentu arah dapat bersifat strategik, taktik, teknis, dan operasional. Semakin tinggi kedudukan pemimpin tersebut maka semakin berat nilai dan bobot dari keputusan yang diambilnya.
2. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara birokrasi, yaitu memiliki pengertian bahwa tidak ada birokrasi yang mampu mencapai tujuannya tanpa memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak diluar birokrasi yaitu *stakeholder*. Pimpinan birokrasi menjadi wakil dan juru resmi birokrasi, fungsi kepemimpinan tidak hanya sebatas pada pemeliharaan hubungan baik saja tetapi juga harus menghasilkan perolehan dukungan yang diperlukan oleh birokrasi dalam usaha pencapaian tujuan birokrasi.

3. Pimpinan sebagai komunikator, yaitu pemeliharaan baik keluar maupun kedalam dilaksanakan melalui proses komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Berbagai keputusan yang diambil disampaikan kepada pelaksana melalui komunikasi. Bahkan sesungguhnya interaksi yang terjadi diantara atasan sesama petugas pelaksana kegiatan operasional dimungkinkan terjadi dengan baik berkat adanya komunikasi yang efektif.
4. Pemimpin sebagai mediator, yaitu dalam kehidupan birokrasi selalu saja ada konflik yang harus diselesaikan, baik dalam hubungan keluar maupun kedalam birokrasi. Dalam suatu birokrasi atau organisasi mungkin saja timbul konflik yang faktornya beragam, oleh karena itu diperlukan sosok mediator yang mampu menjadi penengah dalam konflik yang dalam hal ini adalah sosok seorang pemimpin.
5. Peranan selaku integrator, yaitu merupakan kenyataan dalam kehidupan birokrasi bahwa timbulnya kecenderungan berpikir dan bertindak berkotak-kotak dikalangan anggota birokrasi dapat diakibatkan oleh sifat positif, tetapi dapat pula diakibatkan oleh sikap negatif. Dikatakan positif apabila ada tekad dan kemauan keras dikalangan anggota birokrasi untuk memajukan atau berbuat baik untuk organisasinya. Namun dapat pula dikatakan negatif apabila adanya sikap mementingkan kelompok dan satuan kerja yang menuntut

spesialisasi berlebihan yang menimbulkan persaingan negatif diantara kelompok kerja. Oleh karena hal tersebut maka diperlukan seorang integrator terutama pada hierarki puncak birokrasi. Integrator adalah pimpinan yang memastikan organisasinya berjalan secara efisien dan efektivitas.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai dalam Arifin (2012:103), secara operasional fungsi pokok kepemimpinan dibedakan menjadi lima, yaitu:

1. Fungsi instruksi

Bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan bagaimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Pemimpin yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah

2. Fungsi konsultasi

Bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mampu membantunya dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya adalah konsultasi dari pimpinan kepada orang yang dipimpin yang dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam

tahap pelaksanaan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif di harapkan keputusan-keputusan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.

### 3. Fungsi partisipasi

Dalam menjalankan tugasnya pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaannya mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

### 4. Fungsi delegasi

Dilaksanakan dengan memberikan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan.

### 5. Fungsi pengendalian

Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Sehubungan dengan fungsi pengendalian, pengawasan adalah hal yang penting untuk dilakukan seorang pemimpin. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan (Simbolon, 2004:61). Macam-macam pengawasan menurut Siagian (2003:115-116) ada dua macam yaitu (1) Pengawasan langsung (*direct control*) adalah pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan organisasi terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berupa inspeksi secara langsung yang meliputi pelaksanaan tugas dan kedisiplinan bawahan dalam menjalankannya, dan (2) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Bentuknya berupa laporan yang disampaikan oleh bawahan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tugas seorang pemimpin adalah membawa organisasinya menuju dalam keberhasilan dengan jalan dapat menentukan arah dan tujuan organisasinya dapat menjadi komunikator atau penengah yang baik dalam birokrasi didalamnya serta mampu bertindak tegas dalam memutuskan suatu kebijakan demi keberlangsungan organisasinya.

### 3. Teori Kepemimpinan

Menurut Pasolong (2008:84), teori kepemimpinan pada dasarnya merupakan generalisasi dari perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinannya dengan menitikberatkan pada latar belakang historis, sebab akibat, munculnya kepemimpinan, dan sifat-sifat utama kepemimpinan. Sedangkan menurut Kartono dalam Pasolong (2008:84), teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seni perilaku pemimpin beserta konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menampilkan latar belakang historis kemunculan pemimpin dan kepemimpinan.

Teori dasar munculnya kepemimpinan menurut Siagian dan Anoraga dalam Pasolong (2008:85), terbagi menjadi tiga yaitu: (1) Teori Genetik, (2) Teori Sosial, dan (3) Teori Ekologis. Teori genetik menjelaskan bahwa pimpinan tidak dibangun, tetapi seseorang bisa menjadi pemimpin karena memiliki bakat untuk menjadi pemimpin. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin harus dibangun atau dibentuk, dengan kata lain untuk menjadi seorang pemimpin harus melalui proses pelatihan dan pendidikan yang cukup mendukung. Teori ekologis merupakan gabungan dari teori genetik dan teori sosial. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seseorang dapat sukses menjadi pemimpin apabila mempunyai bakat menjadi pemimpin dan dikembangkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan serta pengalaman dan faktor lingkungan. Selain

teori dasar kepemimpinan tersebut terdapat pendekatan teori-teori mengenai kepemimpinan modern antara lain:

**a. Teori Sifat (*Traits Theory*)**

Menurut Pasolong (2008:88), dalam teori sifat ini diasumsikan bahwa seseorang yang lahir sebagai pemimpin adalah seseorang yang juga memiliki sifat-sifat sebagai seorang pemimpin. Namun dalam teori sifat ini tidak dipungkiri juga bahwa sifat tersebut tidak langsung didapatkan sejak lahir, tapi melalui suatu pendidikan dan pengalaman. Dengan demikian perhatian terhadap pemimpin didasarkan pada sifat-sifat umum yang dimiliki pemimpin seperti fisik, mental, dan kepribadian. Melihat dari hal itu maka banyak yang beranggapan bahwa pemimpin harus memiliki sifat yang lebih besar dan cerdas dibandingkan dengan orang yang dipimpinnya (Thoha, 2010:33).

Yukl dalam Pasolong (2008:89), menjelaskan mengenai teori sifat dalam kepemimpinan bahwa pendekatan Trait menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Dasar dari pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain. Teori-teori kepemimpinan ini mengatakan bahwa keberhasilan managerial dipengaruhi oleh dimilikinya kemampuan-kemampuan yang luar biasa seperti misalnya energi yang tidak habis-habisnya, intuisi yang dalam pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuasaan persuasif yang tidak tertahankan.

Teori sifat ini telah berusaha untuk menggeneralisasikan bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin

apabila memiliki sifat-sifat kepemimpinan sejak lahir. Namun begitu hal ini masih belum cukup terbukti dikarenakan sifat-sifat saja belum dapat cukup menjelaskan seseorang itu sebagai pemimpin apabila tidak disertai dengan faktor keadaan dan pengaruh dari lingkungan pada saat seseorang tersebut memimpin.

#### **b. Teori Kelompok**

Teori kelompok memiliki anggapan bahwa suatu pemimpin dapat berhasil dalam kepemimpinannya apabila dapat bekerja sama dalam suatu kelompok dimana dalam kelompok tersebut terdapat pemimpin beserta dengan pengikut-pengikutnya yang dapat bertukar pikiran secara positif, sehingga mampu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Suatu hasil penelitian ulang oleh Alan (1976) dalam Thoha (2010:35) menunjukkan bahwa pemimpin yang membantu pengikut-pengikutnya memiliki pengaruh positif terhadap sikap, kepuasan, dan pelaksanaan kerja.

Menurut penelitian Greene (1975) dalam Thoha (2010:35), menyatakan apabila seorang bawahan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka pemimpin cenderung melakukan penekanan pada struktur pengambilan inisiatif. Namun apabila para bawahan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik maka pemimpin akan memberikan penekanan dalam hal pemberian perhatian. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa para bawahan juga dapat

mempengaruhi pemimpinnya seperti juga pemimpin yang dapat mempengaruhi bawahannya.

Hasil penelitian Barrow (1976) juga menemukan bahwa produktivitas kelompok memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap gaya kepemimpinan daripada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas. Dari ketiga penelitian tersebut dapat diketahui bahwa bawahan mampu mempengaruhi perilaku pemimpin sebanyak pemimpin dengan perilakunya mempengaruhi bawahan-bawahannya.

### **c. Teori Situasional dan Kontingensi**

Teori situasional ini beranggapan bahwa kinerja suatu kelompok bergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang ada. Kepemimpinan dipandang sebagai hubungan atas pengaruh dan kekuasaan, (Pasolong, 2008:90). Menurut Adair dalam Pasolong (2008:90), pendekatan situasional menyatakan bahwa kejadian besar adalah kekuatan historis yang akan menjadikan seorang pemimpin lahir atau tidak. Teori situasional dan kontingensi mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Dalam hal ini hanya pemimpin yang mengerti dan memahami situasi serta kebutuhan organisasilah yang dapat menjadi pemimpin yang efektif. Teori situasional kontingensi terbagi menjadi: (1) Teori Path Goal, (2) Teori situasional Hersey dan Blanchard, (3) Teori

Kontingensi dari Fiedler. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing teori tersebut:

### 1. Model Teori *Path Goal* versi House

Teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana perilaku seorang pemimpin dalam mempengaruhi kepuasan dan kinerja para bawahan. Secara pokok terdapat empat tipe atau gaya utama kepemimpinan teori Path Goal (Thoha, 2010:42) antara lain:

- a. Kepemimpinan direktif. Tipe ini sama dengan model kepemimpinan otokratis dari Lippit dan White. Merupakan model kepemimpinan instruktif dimana bawahan dapat tau dengan pasti apa yang diharapkan darinya dan pengarahan khusus yang diberikan oleh pimpinan. Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahan.
- b. Kepemimpinan yang mendukung (*Supportive leadership*). Model kepemimpinan ini memberikan perhatian kepada keperluan para bawahan, dan memiliki kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan memiliki perhatian kemanusiaan yang murni terhadap bawahannya.
- c. Kepemimpinan partisipatif. Pada model ini pemimpin berusaha untuk meminta dan menggunakan saran-saran dari para bawahannya. Namun untuk keputusan masih ditentukan oleh pemimpin.
- d. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Menetapkan tujuan yang menantang para bawahannya untuk berpartisipasi. Pemimpin

juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas dan akan mencapai standar yang tinggi.

## 2. Model Teori Hersey dan Blanchard

Hersey dan Blanchard dalam Pasolong (2008:47), mengatakan bahwa gaya kepemimpinan mana yang harus diterapkan pemimpin kepada bawahannya tergantung pada kematangan bawahan. Kematangan atau kedewasaan bawahan bukan dalam arti usia atau stabilitas emosional, melainkan (1) keinginan untuk berprestasi, (2) kesediaan untuk menerima tanggung jawab, dan (3) kemampuan serta pengalaman yang berhubungan dengan tugas, tujuan dan pengetahuan pengikut juga penting dalam menentukan gaya kepemimpinan yang efektif. Adapun gaya kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard dalam Pasolong (2008:50-51)

- a. Gaya instruksi pemimpin: yaitu diterapkan kepada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang rendah. Dalam hal ini bawahan yang tidak mampu dan tidak mau memikul tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Dengan demikian gaya pengarahan yang jelas dan spesifik cocok untuk diterapkan oleh pemimpin.
- b. Gaya konsultasi pemimpin: yaitu diterapkan kepada bawahan yang mempunyai tingkat kematangan rendah ke sedang. Yang dalam hal ini bawahan tidak mampu tetapi berkeinginan untuk memikul tanggungjawab, yaitu memiliki keyakinan tetapi kurang pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian gaya konsultasi yang

memberikan perilaku mengarahkan dan memberikan dukungan untuk memperkuat kemampuan sesuai dengan bawahan tingkat kematangan seperti ini.

- c. Gaya partisipasi pemimpin: yaitu diterapkan pada bawahan yang memiliki tingkat kematangan dari sedang ke tinggi. Bawahan pada tingkat perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan untuk melakukan suatu tugas yang diberikan. Dengan demikian perilaku yang mendukung, tanpa mengarahkan yaitu partisipasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk diterapkan kepada bawahan dengan tingkat kematangan seperti ini.
- d. Gaya delegasi pemimpin: yaitu diterapkan kepada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang tinggi. Dalam hal ini bawahan adalah mampu dan mau untuk memikul tanggungjawab. Dengan demikian gaya “delegasi” yang berprofil rendah dengan memberikan sedikit pengarahan atau dukungan memiliki tingkat kemungkinan efektif yang paling tinggi dengan bawahan dengan tingkat kematangan seperti ini.

### 3. Model Teori Kontingensi Fiedler

Menurut Thoha (2010:37-38), model kontingensi dari Fiedler berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun menurut Fiedler terdapat situasi yang menyenangkan dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris antara lain:

- a. Hubungan pemimpin dengan anggota. Merupakan hal yang paling penting dalam menentukan situasi yang menyenangkan tersebut. Pemimpin akan mempunyai lebih banyak kekuasaan dan pengaruh apabila dapat menjalin hubungan baik dengan anggotanya.
- b. Derajat dari struktur tugas. Merupakan masukan yang sangat penting dalam menentukan situasi yang menyenangkan. Jadi apabila penugasan tersusun dengan baik maka akan memungkinkan pemimpin lebih berpengaruh daripada adanya perintah penugasan yang tidak terstruktur atau kabur.
- c. Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal. Dimensi ini merupakan dimensi yang amat penting dalam situasi yang menyenangkan. Pemimpin akan mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang lebih banyak apabila kedudukannya memperbolehkan untuk memberikan hukuman daripada kalau tidak memiliki kedudukan yang seperti itu.

Menurut Fiedler, situasi yang menyenangkan dapat mempengaruhi hubungan antara pemimpin dengan anggota dan berorientasi pada tugas yang diberikan oleh pemimpin. Situasi yang tidak menyenangkan akan terjadi apabila gaya kepemimpinan yang diterapkan lebih berorientasi pada suatu tugas. Sedangkan situasi yang menyenangkan akan terbentuk apabila gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin menekankan pada hubungan kemanusiaan dengan para bawahan saat pemberian tugas.

#### 4. Gaya Kepemimpinan

Gaya pada dasarnya berasal dari kata *style* yang berarti model atau perilaku seseorang yang sering ditunjukkan dan bisa menjadi ciri khas dari seseorang tersebut. Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya dalam hal perilaku dan penyelesaian tugas. Stoner dalam Pasolong (2008:37) mendefinisikan gaya kepemimpinan (*leadership style*) adalah berbagai macam pola tingkah laku yang disukai dan dipakai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard dalam Pasolong (2008:37), gaya kepemimpinan adalah perilaku yang konsisten ditunjukkan dan diterapkan dalam bekerja sehingga dapat dipersepsikan atau disimpulkan oleh orang-orang dalam lingkungan kerja tersebut dengan cara memberikan tanggapan terhadap perilaku tersebut karena telah menjadi suatu kebiasaan atau tindakan yang dapat diperkirakan oleh orang-orang didalamnya. Sedangkan menurut Thoha (2010:49), gaya kepemimpinan merupakan suatu norma atau perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut berusaha untuk mempengaruhi orang lain.

Dari beberapa pengertian gaya kepemimpinan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki adalah suatu cara dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan kemudian mengarahkan bawahannya sehingga tujuan dari organisasi di dalamnya dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Dari definisi gaya kepemimpinan oleh para ahli terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, antara lain:

**a. Gaya Kepemimpinan Otokratis**

Menurut Pasolong (2008:37), gaya kepemimpinan otoriter atau otoriter biasanya dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Seorang pemimpin dapat dikatakan memiliki ciri-ciri otoriter dalam kepemimpinannya (Siagian, 2003:34), apabila:

1. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi
2. Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi
3. Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata
4. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat
5. Terlalu tergantung kepada kekuasaan formilnya
6. Dalam tindakan penggerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan dan punitive (bersifat menghukum).

**b. Gaya Kepemimpinan Demokratis**

Menurut Pasolong (2008:38), gaya kepemimpinan demokratis lebih dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan demokratis dikenal pula sebagai gaya kepemimpinan

partisipatif. Gaya ini berasumsi bahwa para anggota organisasi yang ambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat memiliki komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Pendekatan ini tidak berarti bahwa pemimpin tidak membuat sebuah keputusan tetapi justru harus memahami terlebih dahulu apa tujuan organisasi sehingga dapat menggunakan pengetahuan para anggotanya (Sudriamunawar dalam Pasolong, 2008:46-47).

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis (Arifin, 2012:92-93), antara lain:

1. Dalam proses pergerakan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia
2. Selalu berusaha menelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya
3. Senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya
4. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan
5. Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi tetap berani untuk berbuat kesalahan yang lain
6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dia sendiri
7. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin.

Gaya kepemimpinan demokratis lainnya yang dikemukakan oleh Sukanto dalam Dimiyati (2014:74) yaitu:

1. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin.
2. Kegiatan-kegiatan yang didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih.
3. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok.

### c. Gaya Kepemimpinan *Laissez Faire*

Seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan *laissez faire* berpandangan bahwa para bawahannya dalam organisasi sudah memiliki sifat dan pemikiran yang dewasa, sehingga sudah mengetahui apa yang menjadi tugas mereka dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Oleh karena itu pimpinan tidak perlu terlalu sering untuk melakukan intervensi dalam kehidupan organisasional asalkan kepentingan bersama tetap terjaga dan tujuan organisasi tetap tercapai (Arifin, 2012:93). Sedangkan menurut Pasolong (2008:47), gaya kepemimpinan *laissez faire* atau gaya kepemimpinan kendali bebas, bukan berarti tidak ada pimpinan sama sekali. Gaya ini berpendapat bahwa suatu tugas disajikan kepada kelompok yang dapat menentukan sendiri teknik dan cara mengerjakan tugas mereka sehingga sasaran-sasaran dan kebijakan organisasi dapat tercapai.

Menurut Ralph White dan Ronald Lippit dalam Pasolong (2008:46), ciri-ciri gaya kepemimpinan *laissez faire* antara lain:

1. Kelompok memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengambil keputusan dengan partisipasi minimal dari pemimpin.
2. Kegiatan yang diberikan oleh pemimpin dengan keterangan bahwa pemimpin akan memberikan penjelasan mengenai tugas tersebut jika diminta
3. Pemimpin tidak pernah berpartisipasi secara penuh
4. Terkadang pemimpin memberikan komentar yang spontan terhadap kegiatan anggotanya, namun tidak bermaksud untuk menilai atau mengatur suatu kejadian.

### **C. Pembangunan Desa**

#### **1. Asas, Prinsip, dan Strategi Pembangunan Desa**

Pembangunan desa sering diorientasikan sebagai pembangunan pertaniannya, namun lebih dari itu sebenarnya pembangunan desa tersebut beragam dan fokus pembangunan desa pada dasarnya adalah masyarakat desa itu sendiri. Menurut Adisasmita (2013:74) pembangunan masyarakat desa didasarkan pada tiga azas, yaitu: 1) Pembangunan integral, 2) Azas kekuatan sendiri, dan 3) Azas pemufakatan bersama.

Pertama, azas pembangunan integral adalah dilihat dari segi masyarakat desa meliputi sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan perumahan agar dapat tercapai secara seimbang antara sektor-sektor tersebut. Kedua, azas kekuatan sendiri adalah setaiah usaha pembangunan desa harus didasarkan pada kekuatan sendiri atau kemampuan dari desa itu

sendiri dan tidak terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ketiga, azas pemufakatan bersama berarti bahwa pembangunan dalam desa dilakukan atas dasar kebutuhan dari masyarakat desa, yang artinya pembangunan difokuskan pada sektor-sektor penting yang benar-benar dibutuhkan oleh desa.

Selain Azas pembangunan, hendaknya desa juga harus menerapkan prinsip-prinsip dalam pembangunannya agar dapat berjalan dengan baik. Berikut prinsip-prinsip pembangunan desa menurut Adisasmita (2013:75) antara lain: 1) Transparansi (keterbukaan), 2) Partisipatif, 3) Dapat dinikmati masyarakat, 4) Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan 5) Berkelanjutan (*sustainable*). Terlepas dari kelima prinsip tersebut sebaiknya seluruh masyarakat desa dilibatkan dalam hal pembangunan seperti menentukan visi dan misi yang akan diwujudkan untuk kedepannya, dikarenakan pembangunan pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat.

Pembangunan pedesaan juga merupakan bagian dari pembangunan kelembagaan dan pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pada wilayah desa tersebut. Di negara-negara berkembang masih banyak penduduk desa yang dapat dikatakan belum memiliki kesejahteraan seperti, masih kurangnya pendidikan, tingkat kesehatan yang rendah, serta sarana dan prasarana dari desa yang belum memadai. Agar tercapai kesejahteraan tersebut maka diperlukan strategi dalam pembangunan desa. Menurut Adisasmita (2013:76), sedikitnya terdapat

empat jenis strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, yaitu:

1. *The Growth Strategy* (strategi pertumbuhan)
2. *The Welfare Strategy* (strategi kesejahteraan)
3. *The Responsive Strategy* (strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat)
4. *The Integrated or Holistic Strategy* (strategi terpadu atau strategi menyeluruh)

Pertama, strategi pertumbuhan meliputi peningkatan dalam berbagai hal seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat pedesaan.

Kedua, strategi kesejahteraan dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan penduduk pedesaan melalui peningkatan pelayanan program-program berskala nasional seperti, peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan pemukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, serta pembuatan sarana dan prasarana sosial lainnya.

Ketiga, strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat merupakan reaksi dari strategi kesejahteraan dikarenakan untuk dapat sejahtera maka desa harus biasa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa

bantuan dari pihak luar. Hal tersebut meliputi teknologi dan tersedianya sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Keempat, strategi terpadu dan menyeluruh pada dasarnya ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan. Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. Tempat prakarsanya adalah kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijaksanaan dan monitoring kegiatan secara terpadu dan terus menerus yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuan atau visi dari desa.

## **2. Ruang Lingkup Pembangunan Desa**

Pembangunan desa mencakup banyak aspek yang berkaitan dengan bidang atau aspek yang berada diluar desa seperti aspek fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi dan sosial budaya. Namun terlepas dari hal itu desa seharusnya dibangun sesuai dengan potensi fisik yang dimilikinya serta adanya partisipasi atau peran dari masyarakat untuk mendukung pembangunan yang ada di desanya. Apabila dukungan dan partisipasi masyarakat sudah didapatkan maka perlu melihat kondisi geografis desa dikarenakan struktur yang berbeda-beda tiap daerah

memungkinkan dilakukan penataan dan pengelolaan tata ruang desa tersebut.

Menurut Adisasmita (2013:59) pembangunan pedesaan itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas namun dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, dan lingkungan pemukiman)
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap daerah pedesaan yang miskin)
5. Peningkatan keterkaitan antar daerah pedesaan dan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan

Pembangunan pedesaan itu sendiri memiliki peranan penting dalam konteks pembangunan nasional dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Oleh karena itu pembangunan pedesaan harus lebih ditingkatkan agar dapat menunjang pembangunan nasional. Dalam pembangunan desa ini pemerintah desa memiliki peranan yang amat penting dan berpengaruh terutama untuk mendorong peranan masyarakat dengan cara memberikan pengarahan dan pengawasan dalam kegiatan pembangunan desa sehingga pembangunan dapat berjalan.

## D. Partisipasi Masyarakat

### 1. Konsep Partisipasi Masyarakat

Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang memiliki arti peran serta. Dalam pengertian yang luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sedangkan pengertian partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat local (Adisasmitha, 2013:78).

Solekhan (2014:144), mengartikan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan secara sadar dan sukarela untuk berkontribusi secara fisik maupun non fisik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Pengertian partisipasi tersebut mengandung unsur-unsur seperti: 1) Keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan, 2) Kesadaran secara sukarela, 3) Adanya sikap pro aktif, 4) Adanya kontribusi yang diberikan baik fisik maupun non fisik, dan 5) Adanya kesepakatan-kesepakatan.

Sesuai dengan pengertian tersebut maka, partisipasi masyarakat memiliki tujuan utama untuk melibatkan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan dan memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka dari itu pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun harus sesuai dan didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan ada banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik secara internal seperti, motivasi, pengetahuan, dan pengalaman individu, maupun secara eksternal seperti, peran dari stakeholders, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program Pembangunan**

Pendekatan partisipatif bermaksud untuk mengajak anggota masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan pedesaan karena masyarakat dianggap paling mengetahui keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya, sehingga dengan begitu diharapkan mereka mampu merumuskan solusi dalam menghadapi masalah yang terdapat di daerahnya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh pendapat Conyers dalam Solekhan (2014:141) yang menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat memiliki arti penting dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa keikutsertaannya proyek pembangunan akan gagal,
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program dan proyek pembangunan apabila merasa dilibatkan dalam proses

persiapan dan perencanaan, dikarenakan mereka akan lebih mengetahui bagaimana proyek tersebut dilaksanakan,

3. Dalam perspektif demokrasi disebutkan bahwa partisipasi itu merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, dapat memperkuat kemauan, kepedulian dan kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam segala bentuk untuk keberhasilan implementasi program pembangunan. Masyarakat harus mampu memberikan partisipasi nyata sesuai dengan program dan kebutuhan daerahnya, tidak hanya dengan menunjukkan daftar keinginannya saja. Begitu pula dengan kelembagaan dan kepemimpinan lokal sebagai faktor penunjang pembangunan juga memiliki tugas dan fungsi dalam hal sosialisasi, pendampingan dan penguatan kelembagaan. Hal tersebut diperlukan sebagai fungsi pengawasan dari proses implementasi program-program yang telah dilaksanakan.

Keberhasilan partisipasi masyarakat tersebut perlu kesadaran dan pemahaman anggota masyarakat dan terlebih diperlukan pula kepemimpinan lokal (*local leadership*) yang tangguh dan memiliki wawasan dalam pembangunan. Oleh karena itu Adisasmita (2013:91) mengemukakan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendekatan partisipatif yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

- a. Sikap dan perilaku anggota masyarakat
- b. Kepemimpinan lokal yang dinamis

- c. Prosesnya meliputi upaya yang dilakukan seperti sosialisasi, pendampingan dan penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan sendiri sangat diperlukan, dikarenakan dengan memberikan kontribusi dalam program pembangunan secara nyata diharapkan dapat memperlancar program pembangunan itu sendiri. Sebab, masyarakat daerah setempat dapat mengidentifikasi program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah, keinginan masyarakat, dan potensi yang terkandung dalam daerah itu sendiri dalam hal perencanaan program pembangunan, pelaksanaan program, serta pengawasan program saat dijalankan sehingga bukan semata-mata untuk keperluan pihak-pihak tertentu saja.

### **3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan ada banyak sekali bentuk dan wujudnya seperti tenaga, dana, harta, dan hasil pemikiran yang disumbangkan demi keberhasilan program pembangunan. Menurut Ndraha dalam Solekhan (2014:152) bentuk partisipasi masyarakat dalam program pembangunan mulai dari gagasan hingga sampai pada bentuknya sebagai bangunan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) Partisipasi yang dilakukan sepanjang proses atau biasa disebut juga partisipasi professional dan 2) Partisipasi yang hanya

dilakukan pada satu atau beberapa fase saja, yang biasa dinamakan dengan partisipasi parsial.

Pandangan lain mengenai bentuk partisipasi dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff dalam Solekhan (2014:152), terdapat empat bentuk partisipasi warga yang terdiri dari: 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*), 2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), 3) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*), dan 4) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Salah satu tujuan terpenting dalam partisipasi masyarakat adalah dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Sanoff dalam Adiyoso (dalam Solekhan 2014:142), bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan. Kemudian untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Terkait dengan partisipasi masyarakat atas kebijakan pemerintah, Maskun dalam Solekhan (2014:164) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat bentuknya bertingkat-tingkat meliputi:

1. Terdapatnya pemahaman timbal balik (mutual understanding) antara perangkat pemerintah dengan masyarakat yang bersangkutan.
2. Terdapatnya sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas goodwill dan politicalwill dari pemerintah.
3. Tertampungnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Terdapatnya usaha-usaha motivasi dan stimulasi yang dapat mendorong kreatifitas masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat terwujud apabila struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri, dan adanya keterwakilan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus didasarkan kepada:

1. Pembuatan keputusan
2. Penerapan keputusan
3. Menikmati hasil
4. Evaluasi hasil

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat terwujud apabila ada kesungguhan dan konsistensi dari berbagai pihak di dalamnya, mengingat hal ini harus dilakukan secara terus menerus dan membutuhkan rentang waktu yang cukup lama bahkan tidak terbatas. Berkaitan dengan bentuk-bentuk partisipasi, maka adapula faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menurut Tjokrowinoto dalam Solekhan (2014:165), antara lain sebagai berikut:

1. Faktor kepemimpinan, dimana dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukan adanya pimpinan dan kualitasnya.
2. Faktor komunikasi, yaitu gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.
3. Faktor pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang memadai, individu atau masyarakat akan memberikan partisipasi yang diharapkan.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat itu sebenarnya bisa didorong dan ditumbuhkan dengan menciptakan suasana yang kondusif baik secara intern maupun secara ekstern

## **E. Sumber Daya Air**

### **1. Air sebagai Kebutuhan Dasar Manusia**

Dalam kehidupan, air berfungsi sangat penting yang digunakan untuk budidaya pertanian, industri pembangkit listrik tenaga air, transportasi, pariwisata, sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Semua orang berharap agar seharusnya air dapat dimanfaatkan secara bijak, namun pada nyatanya masih banyak yang menghamburkan air dan ada pula yang krisis kekurangan air.

Air sebagai kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin langsung oleh konstitusi negara dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 3, yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Penjaminan atas konstitusi itu lebih diperjelas lagi dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air, yang menyatakan bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif'. Jadi secara tidak langsung pada pasal tersebut bahwa untuk memperoleh air bersih adalah hak bagi tiap-tiap orang. Jaminan tersebut juga menjadi tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk didalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air (Sanim, 2011:4)

Air selain sebagai kebutuhan dasar manusia, juga sebagai barang public yang tidak dimiliki oleh siapapun, akan tetapi merupakan bentuk kepemilikan bersama. Untuk itu sumberdaya alam yang dikelola secara kolektif bukan untuk diperjual belikan untuk memperoleh keuntungan. Namun pada saat ini air tidak lagi sekedar menjadi barang publik, tapi sudah menjadi komoditas ekonomi. Hal ini yang menyebabkan adanya tanggapan pro dan kontra terhadap pandangan pengelolaan air modern yang menyebabkan air semakin langka dan terbatas dalam pemenuhannya sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk diperdagangkan.

Berlatar dari hal tersebut maka diperlukan pengelolaan yang baik untuk menjaga sumberdaya air. Menurut Sanim (2011:56-59), pengelolaan sumberdaya air harus mengacu pada prinsip-prinsip antara lain:

- a. Koordinasi dan konsistensi / keselarasan pengelolaan sumberdaya air antara hulu dan hilir yang berjalan dengan baik, demi tersedianya air.
- b. Ketika otonomi daerah diberlakukan maka sebaiknya pengelolaan sumberdaya air menggunakan perspektif penataan antar regional.

- c. Pengaturan tentang konservasi, proteksi, dan pemanfaatan air dalam pengelolaan sumberdaya air semestinya melibatkan tata kelembagaan berbagai *stakeholders*
- d. Pengelolaan sumberdaya air memperhatikan sifat air sebagai *common property*, dimana air tidak dapat diprivatisasi karena sifatnya sebagai sumberdaya milik bersama.
- e. Infrastruktur dan kelembagaan penunjang untuk melindungi air menjadi bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari pengelolaan sumberdaya air.
- f. Negara perlu memiliki *water resource planning* yang terintegrasi memadai, dan komprehensif, melalui kelembagaan yang bekerja secara sefektif dan efisien.
- g. Pengelolaan sumberdaya air dalam *regional perspective* lebih menekankan pada pengelolaan air dalam ruang lingkup kawasan.

## 2. Masalah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Ketersediaan air yang tidak merata diberbagai daerah secara umum disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus menerus meningkat dan adanya ketidakmerataan penyebaran penduduk sehingga mempersulit penyediaan air bagi masyarakat. Rendahnya akses untuk mendapatkan air bersih pada masyarakat miskin dan pedesaan juga dipengaruhi oleh faktor ketersediaan air tanah dan pendistribusian yang tergolong buruk di daerah-daerah tersebut.

Sanim, (2011:18-19) mengelompokkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya pengelolaan sumberdaya air di Indonesia antara lain:

- a. Adanya fragmentasi pengelolaan antar instansi pemerintah dan sulitnya koordinasi antar berbagai instansi yang ada
- b. Pengelolaan sumberdaya air masih sebatas pada orientasi sisi penyediaan saja semata bukan pada sisi kebutuhan

- c. Borosnya pemakaian air untuk pertanian karena rendahnya efisiensi pemakaian air untuk sektor pertanian
- d. Organisasi pengelolaan sumberdaya air masih tersentralisasi di pusat dan belum terdesentralisasi
- e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya air disatu sisi dan disisi lain masih belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam organisasi pengelolaan sumberdaya air
- f. Distribusi pelayanan air yang tidak merata
- g. Polusi air yang terjadi di kota-kota besar sehingga tidak layak dijadikan air sebagai kebutuhan sehari-hari karena telah tercemar
- h. Ketidakmampuan pemerintah untuk memperluas jaringan irigasi
- i. Berkurangnya persediaan air bersih disebabkan berkurangnya daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004:4), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan tersebut diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh membedakan atau mengisolasi individu atau organisasi kedalam suatu variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami suatu fenomena tertentu tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara utuh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks tertentu yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah juga (Moleong, 2004:6).

Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah dengan cara mengumpulkan data-data berupa kata-kata maupun gambar yang mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan ataupun memo, dan

dokumen resmi lainnya beserta data kapustakaan yang berkaitan dengan fenomena. Sehingga disini peneliti bermaksud akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan meterisasi air berbasis partisipatif di Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Metode tersebut dirasa tepat untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena serta perilaku kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan di desa tersebut.

### **B. Fokus Penelitian**

Masalah dalam penelitian kualitatif pada dasarnya bertumpu pada suatu fokus. Fokus penelitian perlu ditentukan untuk membatasi masalah yang akan diteliti di lapangan agar objek yang diteliti dapat terarah dan tidak menyimpang pada saat peneliti melakukan penelitian. Dalam Moleong (2004:94), ada dua maksud yang akan dicapai peneliti dalam hal merumuskan masalah penelitian dengan jalan menentukan fokus. Pertama, penetapan fokus itu sendiri dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan arahan fokus tersebut maka peneliti dapat tahu data mana yang harus dikumpulkan dan dipakai, serta data mana yang mungkin menarik namun tidak relevan untuk dimasukkan kedalam sejumlah data yang akan dikumpulkan.

Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif pada akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti berada dalam lapangan. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalah sudah cukup baik dan telah dirumuskan pula sesuai

dasar kapustakaan bisa pula terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah itu. Dengan demikian kepastian mengenai fokus masalah ditentukan pula oleh keadaan di lapangan pada saat penelitian.

Sesuai dengan pengertian fokus diatas maka, fokus penelitian yang ingin diambil oleh peneliti adalah gaya kepemimpinan kepala Desa Jedong dalam pembangunan fisik di Desa Jedong Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, ditinjau dari segi:

1. Gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan meterisasi air, ketika:
  - a. Memberikan pengarahan
  - b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi
  - c. Melakukan pengambilan keputusan
  - d. Melaksanakan tugas pengawasan
2. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan meterisasi air, antara lain:
  - a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
  - b. Partisipasi dalam pelaksanaan
  - c. Partisipasi dalam menerima manfaat
  - d. Partisipasi dalam evaluasi
3. Kendala-kendala untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan meterisasi air.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana fenomena yang akan diteliti berlangsung, sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana diadakan penelitian tersebut untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan valid sehingga dapat diolah untuk dijadikan pembahasan penelitian.

Disini peneliti menentukan lokasi penelitian yang berada di Desa Jedong Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dikarenakan pada desa ini mulai diadakan pembangunan fisik secara bertahap sehingga cocok bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan meneliti sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Sedangkan untuk situs penelitian sendiri dilakukan pada Kantor Desa Jedong Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dikarenakan situs ini dianggap mampu memberikan informasi yang valid, tepat dan akurat dalam hal menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan data. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Dalam penelitian ini, jenis data yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari:

1. Data Primer

Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara.

Dilakukan wawancara disini adalah untuk memperoleh data secara lengkap dan akurat yang bersumber langsung dari informan dan mungkin belum diperoleh dari data sekunder yang telah dikumpulkan.

Untuk penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui wawancara dapat bersumber dari Kepala Desa Jedong, Sekretaris Desa Jedong, pegawai dan aparatur Desa Jedong serta masyarakat Desa Jedong sendiri.

2. Data Sekunder

Dalam hal ini, peneliti akan mencatat hal yang telah tersedia dan tentunya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, laporan, peraturan-peraturan, serta artikel yang bersumber dari internet. Data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu mengenai program-program pembangunan di Desa Jedong.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah dikarenakan dari data yang dihasilkan nanti dapat digunakan untuk

memecahkan masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Observasi atau Pengamatan

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu pengamatan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya, seperti yang diungkapkan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2004:174), Pertama, teknik pengamatan didasarkan pada pengalaman secara langsung sehingga keabsahan data yang diamati dapat diyakini. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, sering terjadi keraguan pada peneliti, jangan-jangan data yang diperoleh keliru atau bias, melalui pengamatan langsung maka dapat dilihat keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data yang akurat. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi rumit yang terjadi di lapangan. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka pengamatan bisa menjadi alat yang bermanfaat.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap pembangunan yang sedang berjalan serta melakukan pengamatan terhadap

cara-cara Kepala Desa Jedong dalam hal mengorganisasikan bawahan serta masyarakat dalam hal pembangunan desa secara fisik.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang terdiri dari dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Maksud dari wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2004:186), adalah untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan lain-lain yang diharapkan untuk dapat memverifikasi, mengubah, atau memperluas informasi yang diperoleh dari informan.

Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa Jedong mengenai program-program pembangunan yang telah dibuat, cara mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengarahkan bawahan serta masyarakat untuk berpartisipasi, selanjutnya adalah sekretaris desa dan para aparatur desa mengenai cara dan gaya memimpin dari Kepala Desa, serta masyarakat Desa Jedong itu sendiri.

## 3. Dokumentasi

Dari segi dokumentasi, peneliti memfokuskan memperoleh data melalui arsip serta dokumen yang ada dalam kantor Desa Jedong mengenai pembangunan fisik desa dalam periode tertentu, buku-buku, sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan

dilakukan, data statistik yang sesuai dengan masalah yang diteliti, dan melalui gambar atau foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian.

#### 4. Studi Kepustakaan

Untuk studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah serta artikel-artikel yang ada di internet yang kesemuanya berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### F. Instrumen Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya, Moleong (2004:163). Dengan demikian manusia dapat dikatakan sebagai instrumen penelitian, atau peneliti itu sendiri merupakan instrumen penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2004:168), ada beberapa ciri umum yang memungkinkan manusia sebagai instrumen penelitian yaitu:

1. Responsif: Manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Manusia juga bersifat interaktif terhadap orang dan lingkungannya sehingga dapat memahami sesuatu yang terjadi di lingkungannya.

2. Dapat menyesuaikan diri: manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data.
3. Menekankan keutuhan: manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan kreatifitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, jadi sebagai konteks yang berkesinambungan dimana mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang riil, benar, dan mempunyai arti. Pandangan yang menekankan keutuhan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memandang konteksnya dimana ada dunia nyata bagi subjek dan responden dan juga memberikan suasana, keadaan dan perasaan tertentu.
4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan: manusia sebagai instrumen penelitian memiliki kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya.
5. Memproses data secepatnya: manusia sebagai instrumen dapat memproses data secepatnya setelah diperoleh, menyusunnya kembali, merumuskan hipotesis kerja sewaktu berada di lapangan, dan mengetes hipotesis itu pada respondennya secara langsung.
6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan: manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan

lainnya, yaitu kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.

7. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan *idiosinkratik*: manusia sebagai instrumen memiliki pula kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak terduga lebih dahulu, atau yang tidak lazim terjadi.

Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, dengan segenap aktivitasnya dalam mengambil, mengumpulkan data, membuat hipotesis sementara, observasi, serta melakukan wawancara dengan responden.
2. Instrumen pembantu, yang terdiri dari:
  - a. Pedoman wawancara (interview guide), yaitu yang berisi tentang poin-poin pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang digunakan untuk menjadi dasar atau acuan dalam berwawancara dengan informan nantinya.
  - b. Catatan lapangan (field note), yaitu coretan seperlunya yang dipersingkat dan berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan yang dapat dirubah menjadi dirubah menjadi suatu catatan lengkap dan diolah ketika peneliti telah berada di rumah.

### G. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2004:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, serta menemukan apa saja yang penting yang dapat diceritakan kepada orang lain.

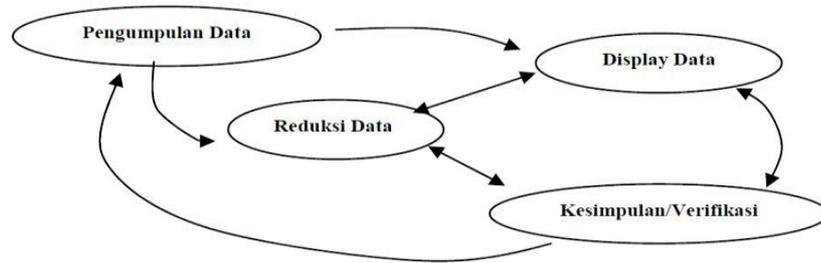
Sedang menurut Janisce McDrury dalam Moleong (2004:248), tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan penting yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata kunci dan menemukan tema yang berasal dari data yang telah dikumpulkan.
3. Menuliskan “model” yang telah ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.

Analisis model data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif

Miles dan Huberman, yaitu:

Gambar 1: Komponen Analisa Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2014)

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dengan cara wawancara, observasi atau penelitian di lapangan secara langsung, serta pengumpulan data melalui dokumentasi kegiatan dan objek yang dianggap penting.

### 2. Reduksi data

Mengidentifikasi data, menggolongkan data, serta mengorganisasikan data yang akan dikaitkan dengan fokus masalah, dan membuang data yang tidak perlu untuk dimasukkan sehingga agar dapat ditarik kesimpulan. Agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan sebagai panduan untuk pengumpulan data selanjutnya.

### 3. Penyajian data

Data yang telah dikelompokkan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tabel, kalimat dan uraian. Melalui data yang telah

diorganisasikan tersebut maka akan tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin dapat dimengerti.

#### 4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Selama proses pengumpulan data, peneliti mencoba untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan cara mencari pola tema, hubungan persamaan, serta penjelasan alur sebab-akibat yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Gambar 2: Peta Wilayah Kabupaten Malang



Sumber: Peta-kota.blogspot.co.id

### a. Kondisi Geografis Daerah

Secara administratif, Kabupaten Malang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, terletak pada  $112^{\circ} 17' 10,90''$  sampai dengan  $112^{\circ} 57' 00''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 44' 55,11''$  sampai dengan  $8^{\circ} 26' 35,45''$  Lintang Selatan. Batas administratif Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kediri
- Sebelah timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo

Kabupaten Malang mencakup 33 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan  $3347,87 \text{ km}^2$ . dikelilingi oleh gunung /pegunungan Arjuno, Anjasmoro, Kelud, Bromo, Semeru dan Tengger.

Kondisi iklim Kabupaten Malang menunjukkan nilai kelembaban tertinggi adalah 90.74 % yang jatuh pada bulan Desember, sedangkan nilai kelembaban terendah jatuh pada bulan Mei, rata-rata berkisar pada 87.47 %. Suhu rata-rata  $26.1 - 28.3 \text{ }^{\circ}\text{C}$  dengan suhu maksimal  $32.29 \text{ }^{\circ}\text{C}$  dan minimum  $24.22 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . Rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 km/jam. Kecepatan angin terendah yakni berkisar pada 0.55 km/jam umumnya jatuh pada bulan Nopember dan tertinggi yakni 2.16 km/jam jatuh pada bulan September. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.800 – 3.000 mm per tahun, dengan hari hujan rata-rata antara 54 – 117 hari/tahun.

**b. Topografi Kabupaten Malang**

- Kelerengan 0-2% yang meliputi kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran dan Pakisaji
- Kelerengan 2-15% yang meliputi kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, bampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan
- Kelerengan 15-40% yang meliputi kecamatan Sumbermanjing Wetan, Wagir, dan Wonosari)
- Dan kelerengan 40% meliputi kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

Debit sumur umumnya bervariasi sesuai dengan kondisi geologi dan topografinya. daerah lembah Brantas umumnya memiliki debit bervariasi antara 10-20 L/detik, meluas mengikuti lembah tersebut sampai ke Singosari. Ke arah timur, barat dan utara, potensi air bawah tanah menurun secara berangsur-angsur pada medan vulkanik sesuai dengan meningkatnya kemiringan lereng dan meliputi daerahdaerah dengan ketinggian di atas sekitar 300-500 m yang potensi pengembangan penyediaan air bersihnya sangat kecil.

Di bagian selatan Kabupaten Malang, air bawah tanah didapat pada batugamping Pegunungan selatan. Akibat dalamnya muka airtanah dan permeabilitasnya yang terlokalisir, sumber-sumber air tersebut

tampaknya sangat sulit dimanfaatkan menggunakan sumur bor. Kabupaten Malang memiliki sumber mata air yang paling padat di Jawa Timur yakni sebanyak 684 sumber. Kebanyakan airnya dimanfaatkan untuk pengairan di dekat sumber atau mengalir ke saluran atau sungai menuju aliran dasar aliran utama sungai Brantas.

Kota-kota kecamatan di Kabupaten Malang umumnya terletak di daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan sumber mata air merupakan bentuk penyediaan air bersih yang diharapkan. Karenanya, sumber mata air merupakan sumber air baku untuk air bersih yang disarankan untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Malang, kecuali Kota Poncokusumo yang disarankan menggunakan sumber sungai, karena sumber mata air yang ada tidak memadai dalam memberikan penyediaan air bersih untuk daerah tersebut.

Potensi air permukaan dan air tanah di wilayah Kabupaten Malang cukup besar untuk kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana tentunya keberadaannya diupayakan konservasi dan perlindungan antara lain dengan menetapkan daerah imbuhan air bawah tanah yang terletak pada ketinggian di atas 200 mdpl sebagai kawasan lindung air bawah tanah serta agar dipergunakan sehemat mungkin dan dilindungi dari dampak pencemaran lingkungan. Ada 44 sungai yang mengalir di Kabupaten Malang. Sungai-sungai tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Malang

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (M3/Detik)	Volume (M3)
1	Kali Konto	120	N/A	19.30
2	Kali Lekso	120	N/A	
3	Kali Lemurung	120	N/A	
4	Pait Atas	120	N/A	
5	Sumber Metro	120	N/A	
6	Kali Brantas Bawah	120	N/A	8
7	Kali Metro	120	N/A	
8	Sumber Brantas	120	N/A	
9	Kali Brantas Atas	120	N/A	
10	Kali Mewek	120	N/A	
11	Kali Bodo	120	N/A	
12	Kali Klampok	120	N/A	
13	Sumber Klampok	120	N/A	
14	Kali Welang	120	N/A	
15	Sumber Welang	120	N/A	2.000
16	Kali Surak	120	N/A	
17	Sumber Surak	120	N/A	
18	Sumber Jilu	120	N/A	
19	Kali Jilu	120	N/A	
20	Kali Pakis	120	N/A	
21	Kali Cokro	120	N/A	
22	Sumber Amprong	120	N/A	
23	Kali Amprong	120	N/A	
24	Is Kedung kandang	120	N/A	
25	Sumber Meri	120	N/A	
26	Kali Meri	120	N/A	

27	Kali Kemanten	120	N/A	30
28	Sumber Kemanten	120	N/A	
29	Sumber Kedung Kandang	120	N/A	
30	Kali Lumbang sari	120	N/A	
31	Sumber Bureng	120	N/A	6.000
32	Kali Pegunungan Selatan	120	N/A	15
33	Kali Semeru Selatan	120	N/A	
34	Kali Sipring	120	N/A	2.000
35	Lesti Utara	120	N/A	
36	Lesti Selatan	120	N/A	
37	Jaruman Kebon Alas	120	N/A	
38	Is Molek	120	N/A	
39	Kali Metro Hilir	120	N/A	
40	Sumber Metro Hilir	120	N/A	
41	Sumber Rowo Klampok	120	N/A	97.000
42	Kali Lemon	120	N/A	
43	Kali Gombong	120	N/A	
44	Kali Biru	120	N/A	

Sumber: *Percepatan Pembangunan Sanitasi Pamukiman (PPSP.nawasis.info)*

Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Malang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan

peruntukan tanah dan ruangnya. Adapun luas wilayah per kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 2 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(Ha)	(%) thd total
1	DONOMULYO	10 Desa	17.535	4,96%
2	KALIPARE	9 Desa	13.215	3,74%
3	PAGAK	8 Desa	9.010	2,55%
4	BANTUR	10 Desa	17.575	4,97%
5	GEDANGAN	8 Desa	17.000	4,81%
6	SUMBER MANJING WETAN	15 Desa	27.160	7,68%
7	DAMPIT	11 Desa/1 Kel	14.895	4,21%
8	TIRTOYUDO	13 Desa	22.651	6,41%
9	AMPELGADING	13 Desa	20.044	5,67%
10	PONCOKUSUMO	17 Desa	22.250	6,29%
11	WAJAK	13 Desa	12.485	3,53%
12	TUREN	15 Desa/2 Kel	6.420	1,82%
13	BULULAWANG	14 Desa	5.195	1,47%
14	GONDANGLEGI	14 Desa	6.985	1,98%
15	PAGELARAN	10 Desa	4.015	1,14%

16	KEPANJEN	14 Desa/4 Kel	5.660	1,60%
17	SUMBERPUCUNG	7 Desa	4.138	1,17%
18	KROMENGAN	7 Desa	4.452	1,26%
19	NGAJUM	9 Desa	6.624	1,87%
20	WONOSARI	8 Desa	6.191	1,75%
21	WAGIR	12 Desa	7.709	2,18%
22	PAKISAJI	12 Desa	4.465	1,26%
23	TAJINAN	12 Desa	4.032	1,14%
24	TUMPANG	15 Desa	6.480	1,83%
25	PAKIS	15 Desa	6.481	1,83%
26	JABUNG	15 Desa	12.680	3,59%
27	LAWANG	10 Desa/ 2 Kel	7.165	2,03%
28	SINGOSARI	14 Desa/ 3 Kel	12.244	3,46%
29	KARANGPLOSO	9 Desa	7.115	2,01%
30	D A U	10 Desa	5.775	1,63%
31	PUJON	10 Desa	12.095	3,42%
32	NGANTANG	13 Desa	15.195	4,30%
33	KASEMBON	6 Desa	8.550	2,42%
	Total	378 Desa/12 Kelurahan	353.486	100,00%

Sumber: Percepatan Pembangunan Sanitasi Pamukiman  
(PPSP.nawasis.info)

## 2. Gambaran Umum Desa Jedong

Gambar 3: Wilayah Desa Jedong, Kecamatan Wagir



Sumber: Website Google Maps

### a. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Jedong

Desa Jedong berada di Wilayah Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan luas wilayah secara administratif yaitu 356,10 Ha yang terdiri dari persawahan 108,05 Ha, tanah tegal 67 Ha, tanah pekarangan 36 Ha, perkampungan 129 Ha, dan lain-lainnya seperti hutan, sungai, makam, dan jalan 16,05 Ha. Jumlah curah hujan rata-rata 17 Mm dan suhu rata-rata harian 31°C. Desa Jedong memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Desa Pandan Landung, Kecamatan Wagir
- Selatan: Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir
- Barat : Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir

- Timur : Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun

Jumlah penduduk Desa Jedong mencapai 6.748 jiwa dan memiliki 10 RW dan 41 RT. Mayoritas agama yang berkembang di Desa Jedong adalah Islam, Kristen, dan Hindu.

#### **b. Visi dan Misi Desa Jedong**

Visi Desa Jedong adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEDONG YANG MANDIRI, BERKARAKTER, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA”

Sedang misi dari Desa Jedong adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiaian keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun etos kerja positif dan berkarakter di lingkungan Pemerintahan desa mulai dari Kepala Desa sampai pada Ketua RT.
4. Menata pemerintahan Desa Jedong yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.

6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuhkembangkan usaha kecil menengah.
8. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam melestarikan lingkungan hidup.
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan entrepreneur (wirausahawan).
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sector pertanian, perkebunan, dan peternakan baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipatif**

Gaya kepemimpinan adalah perilaku seorang pemimpin yang digunakan pada saat pemimpin tersebut mempengaruhi bawahannya dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain seorang pemimpin harus mampu untuk menyelaraskan persepsi antara orang yang akan mempengaruhi perilakunya dan dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi oleh model kepemimpinannya.

Maka seorang pemimpin organisasi harus mampu bekerja sama dengan bawahannya yang ada di organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Agar lebih mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan Kepala Desa Jedong untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan program meterisasi air, maka peneliti akan menyajikan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

**a) Pemberian pengarahan program pembangunan meterisasi air oleh kepala desa kepada perangkat desa dan masyarakat setempat.**

Seorang pemimpin memiliki banyak sekali sifat-sifat yang melekat di dalam dirinya. Sifat tersebut dapat menjadi alat untuk menentukan keberhasilan dalam memimpin organisasinya. Salah satunya adalah sifat sadar akan tujuan dan arah kemana dia harus membuat kebijakan yang mampu dipahami oleh bawahannya dan mampu dilaksanakan dengan baik oleh bawahannya. Untuk itu sebelum menyusun program pembangunan dan membuat keputusan maka lebih baik seorang pemimpin memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada para bawahannya agar dapat dimengerti dan selanjutnya bawahan akan memahami apa saja yang menjadi tugasnya.

Selain itu keberhasilan program yang dibuat oleh desa tidak lepas dari peranan kepala desa serta perangkatnya dalam hal mengarahkan masyarakat untuk berperan serta dalam program tersebut. Pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa kepada masyarakat memerlukan kerjasama yang saling menguntungkan dan timbal balik agar

dapat menciptakan situasi yang bersifat kebersamaan dalam hal pelaksanaan program. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung keberhasilan program yang telah direncanakan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Jedong:

“Pengarahan yang biasanya saya berikan kepada perangkat desa disini sifatnya hanya memberikan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan. Saya biasanya menyampaikan apa pentingnya program dan pandangan bagaimana cara pengerjaan program tersebut supaya lancar. Kalau perangkat desa sudah memahami maka saya akan melibatkan masyarakat dengan terjun langsung dan mengadakan musyawarah di balai desa. Musyawarah juga melibatkan ketua RT dan RW setempat dan biasanya mendatangkan LPMD dan anggota karang taruna juga. Hal tersebut selalu dilakukan supaya masyarakat paham sehingga jika sudah begitu bisa saling kerjasama untuk membangun Desa Jedong ini. Untuk pengarahan pembangunan meterisasi air sendiri memang lebih saya tekankan mengenai apa pentingnya penyaluran air yang lancar di desa ini agar masyarakat bisa semuanya menikmati air untuk kebutuhan sehari-harinya, mengingat *supply* air di desa ini untuk masing-masing kepala rumah tangga tidak sama. Ada yang airnya berasal langsung dari mata air, ada yang berasal dari sumur dan kesemuanya itu penyaluran airnya berbeda-beda kadang lancar kadang ada yang tidak mendapat air atau air mengalir sedikit saja. Untuk itu saya memberikan pengarahan dan penjelasan bahwa pembangunan meterisasi air penting dilakukan sebelum pelaksanaan programnya dikerjakan”.

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 09.23 WIB)

Pengarahan yang dilakukan oleh pemimpin dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan suatu hal yang penting, karena hal tersebut diperlukan pula untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seorang kepala desa dalam hal ini harus mampu untuk mendorong serta memberikan motivasi kepada perangkat

desa dan masyarakat setempat untuk menggerakkan mereka agar mau ikut berpartisipasi terhadap program pembangunan desanya. Dalam hal ini Kepala Desa Jedong selalu memberikan pengarahan yang berupa penjelasan dan penyuluhan program kepada perangkat desa dan masyarakatnya secara langsung dengan cara melakukan kegiatan musyawarah desa.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutris selaku sekretaris Desa Jedong dalam hal pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong:

“Kepala Desa Jedong biasanya memang selalu menjelaskan terlebih dahulu program-program yang akan dikerjakan selama satu tahun kedepan dalam kegiatan musyawarah desa yang disitu membahas mengenai rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Itupun dengan melibatkan seluruh warga masyarakat Desa Jedong mulai dari perwakilan masyarakat, RT, RW, anggota LPMD, PKK, dan karang taruna juga. Pak Kades juga memberitahukan bidang-bidang pembangunan mana yang sifatnya penting dan harus segera dilaksanakan. Untuk program meterisasi air sendiri Pak Kades memang sudah lama mengarahkan masyarakat dan memberikan penjelasan pentingnya pipanisasi dan meterisasi supaya warga dapat terpenuhi semua kebutuhan airnya”.

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 09.52)

Hal tersebut didukung juga oleh pendapat dari Bapak Henianto selaku perangkat Desa Jedong:

“Untuk pemberian pengarahan terhadap program pembangunan memang selalu dilakukan. Gunanya supaya masyarakat tahu kondisi desa yang harus dibangun mendesak yang mana. Dan bagaimana cara membangun serta musyarawah juga untuk pembiayaan pembangunannya. Pak Kades biasanya memang mengumumkan program yang akan segera dibangun di desa. Pengarahannya membuat masyarakat antusias apabila program yang dibuat memang sudah

ditunggu-tunggu warga sini. Dengan adanya pengarahan terlebih dahulu seperti itu masyarakat jadi mengerti dan biasanya langsung membentuk panitia untuk pembangunan, karena warga disini masih ada budaya gotong-royong ikut membantu baik itu per RT atau per RW setempat. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menjelaskan apa-apa saja yang dirasa kurang dimengerti atau yang sedang dibutuhkan, untuk itu diadakan musyawarah bersama warga desa”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 10.27 WIB)

Pemberian pengarahan tentang program pembangunan oleh Kepala Desa Jedong dilakukan dengan cara terjun langsung dalam masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk memberikan pemahaman akan program-program pembangunan yang penting untuk dilaksanakan. Untuk program meterisasi sendiri yang sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang, pengarahan diberikan kepada panitia pelaksanaan pembangunan meterisasi air dengan melibatkan ketua RT dan RW setempat. Pertemuan dan musyawarah yang diadakan juga dimaksudkan agar masyarakat mau ikut berpartisipasi menggerakkan program pembangunan, khususnya yang dibahas disini adalah program pembangunan meterisasi air.

**b) Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi oleh kepala desa kepada perangkat desa dan masyarakat setempat.**

Salah satu faktor penting lainnya dalam melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh seorang pemimpin selain melakukan pengarahan adalah melaksanakan koordinasi dan komunikasi terhadap bawahan dan orang-orang yang berada lingkungan di sekitarnya untuk mendukung proses pembangunan dan keberhasilan program yang telah

dibuat sebelumnya. Seorang pemimpin juga diharapkan mampu memberikan informasi berupa data, fakta dan pendapat apabila bawahan dan stakeholders terkait membutuhkannya. Diharapkan dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik mampu menciptakan suasana kerjasama yang baik antar berbagai pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong dalam mengordinasi dan melakukan komunikasi dengan para perangkat desa dan masyarakat desa setempat mengenai pembangunan meterisasi air diharapkan mampu memberikan pengertian dan mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dengan warga setempat diharapkan pembangunan meterisasi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semua.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Jedong dalam hal pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam program meterisasi air, sebagai berikut:

“Koordinasi dan komunikasi memang wajib dilakukan jika ingin program ini berjalan dengan lancar. Untuk koordinasi dalam pembangunan meterisasi air ini sendiri dilakukan dengan cara pembentukan panitia pembangunan meterisasi air. Dengan adanya panitia tersebut maka akan lebih memudahkan dalam hal pengerjaan pembangunan nantinya. Panitianya saya usulkan untuk disusun per RW karena memang pembangunan dilaksanakan per RW di tiap-tiap dusun. Koordinasi itu dibentuk untuk memudahkan komunikasi antara panitia meterisasi air di tingkat desa dengan panitia meterisasi air di tingkat dusun. Dalam pelaksanaannya nanti memang akan selalu saling berkomunikasi agar dapat saling mengetahui apa saja yang dibutuhkan

dan apa saja yang sekiranya susah dilakukan supaya dapat saling gotong royong dan swadaya untuk membantu”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 09.28 WIB)

Selain itu yang disampaikan oleh Bapak Sutris, Sekretaris Desa Jedong mengenai koordinasi dan komunikasi dalam pembangunan meterisasi air:

“Kalau untuk hal koordinasi memang sudah ada dan Bapak Kades mengusulkan untuk membentuk panitia di tingkat desa dan panitia di tingkat dusun untuk koordinasi. Saya rasa hal tersebut cukup efektif karena dengan begitu komunikasi perintah yang diberikan dari atasan kepada bawahan sekaligus penyampaian kepada masyarakat dapat terkoordinir dengan baik. Sebaliknya juga masyarakat juga bisa lebih memahami apabila program tersebut disampaikan, juga sekaligus dapat memberikan usul melalui RT dan RW sebagai panitia dusun”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 09.56 WIB)

Didukung pula dengan pendapat dari Bapak Henianto selaku Perangkat Desa Jedong:

“Komunikasi yang dilakukan cukup baik mulai dari awal rencana program dibentuk sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Apa saja keluhan dari masyarakat selalu didengar oleh Kepala Desa Jedong. Mulai dari pengadaan alat meterisasi sampai dengan pengumpulan dana swadaya dari masyarakat juga dibicarakan dengan baik dan apa adanya. Saya memahami apa saja tuntutan yang harus dilaksanakan yang sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan oleh panitia bersama Kepala Desa karena saya sendiri juga selaku panitia meterisasi air di tingkat dusun”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 09.56 WIB)

Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Jedong sudah melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik terhadap semua panitia pembangunan meterisasi air sekaligus dengan

masyarakat. Koordinasi dan komunikasi dilakukan dua arah baik oleh Kepala Desa Jedong kepada panitia dan masyarakat, juga sebaliknya dari masyarakat kepada Kepala Desa Jedong melalui usul yang disampaikan kepada panitia dusun setempat. Komunikasi ini dilakukan berurutan yaitu pada tahap awal proses perencanaan program pembangunan saat menyusun Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP-Desa) dimana kepala desa akan menjelaskan mengenai program-program yang akan dilaksanakan dalam setahun kedepan dan diawasi langsung penyusunannya oleh BPD selanjutnya, mengadakan rapat musrenbang dengan semua apartur desa beserta masyarakat, kemudian pembentukan panitia pembangunan meterisasi air, lalu diadakan rapat di tingkat RT. Hal tersebut juga menunjukkan dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa secara transparan dan apa adanya mampu menggerakkan masyarakat Desa Jedong untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan meterisasi air.

**c) Pengambilan keputusan oleh kepala desa dengan melibatkan masyarakat setempat.**

Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi kepemimpinan yang sangat penting dalam organisasi. Kepala Desa dalam hal ini selaku pemimpin memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang telah tertera di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Maka sebagai seorang pemimpin, kepala desa memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan

dengan baik. Keputusan harus dibuat oleh kepala desa agar masyarakat dapat melaksanakan program pembangunan dan ikut serta berpartisipasi di dalamnya sehingga tujuan dari pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dalam proses pengambilan keputusan, seorang kepala desa harus mampu mempertimbangkan segala aspek dan berbagai kemungkinan yang muncul termasuk harus mampu mencari alternatif pemecahan masalah apabila ada beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa juga harus bersifat terbuka atau transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu seorang kepala desa harusnya mampu membuat keputusan dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada dalam desa tersebut.

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Jedong:

“Dalam hal pengambilan keputusan saya tidak pernah langsung menentukan sendiri. Saya selalu membicarakannya dengan semua perangkat desa yang ada dan juga mengadakan rapat atau musyawarah dengan semua perwakilan masyarakat. Bulan April yang lalu baru saja diadakan musyawarah Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDESA) untuk tahun 2016. Dengan mengadakan RKPDESA tersebut saya dapat mengetahui apa saja usulan-usulan yang masuk dan dapat menjadi pertimbangan nantinya dalam menetapkan keputusan. Untuk program meterisasi pun begitu, saya rundingkan dahulu dengan semua panitia dan masyarakat mengenai anggaran, peralatan yang dibutuhkan dan pelaksanaannya di tiap-tiap RW, apabila semuanya sudah sepakat dan setuju maka selanjutnya program itu akan dijalankan bersama”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 09.32 WIB)

Selain itu pendapat dari Bapak Sutris selaku Sekretaris Desa Jedong mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong adalah:

“Menurut saya pribadi, Pak Sumariyadi merupakan pemimpin yang baik, begitu pula dalam hal pengambilan keputusan di program-program yang ada di Desa Jedong ini. Beliau tidak malu untuk turun langsung dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi maksud dan tujuan dari program. Termasuk untuk meterisasi air ini sendiri yang merupakan prakarsa beliau dan juga mengikutsertakan seluruh warga desa sini. Jadi kalau menurut saya memang selalu didiskusikan dahulu apabila beliau hendak mengambil keputusan”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 10.11 WIB)

Pernyataan tersebut dilengkapi juga oleh pendapat dari Bapak Henianto selaku Perangkat Desa Jedong:

“Kalau untuk pengambilan keputusan, biasanya Pak Kades mengumpulkan perangkat dan warga Desa untuk mengadakan musyawarah. Untuk program meterisasi sendiri memang ada usul dari beberapa warga yang mengalami kesulitan mendapat air, katanya terkadang air itu tiba-tiba tidak mengalir kemudian ditampung semua usulan dan keluhan warga, selanjutnya dirapatkan bersama Pak Kades lalu dilaksanakan pembangunannya”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 10.39 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong dengan masyarakat diambil secara bersama dengan bantuan dari perangkat desa setempat. Desa Jedong sendiri juga rutin melakukan musyawarah seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang diadakan satu tahun sekali dengan melibatkan berbagai pihak antara lain, unsur perangkat Desa, BPD, dan kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna dan

LPMD. Diluar itu masih ada pula musyawarah tidak resmi yang dilakukan langsung dengan masyarakat setempat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukakan oleh Kepala Desa Jedong melibatkan aspirasi dari seluruh masyarakat terkait yang ada didalamnya.

**d) Pemberian pengawasan oleh kepala desa kepada panitia pelaksanaan pembangunan meterisasi air**

Kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari program yang sudah dilaksanakan. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan program yang sudah direncanakan sebelumnya atau tidak. Sehubungan dengan hal itu maka Kepala Desa Jedong juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap program pembangunan di desanya, baik pengawasan tersebut dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Jedong mengenai pengawasan terhadap pembangunan meterisasi air:

“Kegiatan pengawasan yang biasanya saya lakukan seperti meminta laporan pertanggungjawaban rutin sebanyak dua kali dalam setahun atau per enam bulan sekali. Laporan tersebut berupa data iuran warga untuk air bersih yang dibayarkan sebulan sekali dan dikelola oleh RT dan RW setempat. Besarnya iuran sendiri berbeda-beda tergantung pada penggunaan air ditiap-tiap rumah tangga, kurang lebih Rp 5000 tiap konsumen dan tiap Rp 1000 akan dimasukkan kedalam kas desa dan sisanya untuk biaya pengelolaan oleh masyarakat. Selain itu juga saya memantau dengan cara mengadakan rapat bersama seluruh panitia terkait meterisasi air. Hal lainnya adalah bila memungkinkan juga meninjau langsung tempat yang menjadi sumber mata air dan tandon-tandon air yang ada, karena semakin lama debit air berkurang namun penduduk juga terus bertambah, hal tersebut

diduga juga karena adanya pembelian lahan yang oleh pihak-pihak lain untuk dibangun sebagai pabrik atau gudang penyimpanan”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 09.41 WIB)

Adapula pernyataan dari Bapak Sutris selaku Sekretaris Desa Jedong dalam hal pengawasan pembangunan meterisasi air:

“Pengawasan program meterisasi air ini dilakukan setahun dua kali, biasanya para ketua RW setempat menyampaikan laporan iuran air bulanan kepada Kepala Desa sebagai bukti dari pelaksanaan program tersebut. Namun juga kadang dibahas langsung oleh Pak Kades dalam rapat dengan panitia pembangunan meterisasi air ini tiap tahun karena dari tahun 2014 pelaksanaan program ini sampai dengan sekarang masih ada beberapa masalah seperti debit air mulai berkurang dan juga kurangnya dana desa sehingga perlu adanya bantuan dan swadaya dari masyarakat untuk perputaran uang agar dapat membantu beberapa RW dan dusun yang sampai saat ini pembangunan meterisasi airnya belum terlaksana”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 10.16 WIB)

Begitu pula dengan pendapat dari Bapak Henianto selaku Perangkat Desa Jedong terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong:

“Kepala Desa melakukan pengawasan dengan cara menyuruh anggota panitia dusun khususnya untuk melaporkan hasil iuran rutin bulanan yang direkap dan dilaporkan satu tahun sekali. Terlepas dari itu selebihnya bebas asalkan semua pihak tetap menjalankan tugasnya dengan baik sudah tidak masalah bagi Pak Kades”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Jedong pada hari Selasa, 26 Juli 2016 pukul 10.44 WIB)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa Jedong melakukan pengawasan dengan dua cara yaitu secara langsung dengan mengadakan rapat bersama panitia pembangunan meterisasi air dan juga meninjau tempat-tempat yang menjadi sumber aliran air untuk kebutuhan

masyarakat setempat. Dan pengawasan secara tidak langsung dengan cara meminta laporan iuran air bersih tiap enam bulan sekali.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Meterisasi Air**

Partisipasi masyarakat akan dapat tercipta apabila dihidupkan dengan adanya sifat saling percaya antar stakeholders. Hal tersebut dapat terlaksana apabila adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dilakukan oleh seorang pemimpin. Disini Kepala Desa Jedong dituntut agar mampu mengomunikasikan dengan baik mengenai program pembangunan meterisasi air ini kepada masyarakat agar mereka tahu bagaimana pentingnya program pembangunan ini bagi masyarakat desa, sehingga diharapkan masyarakat mau untuk ikut serta dalam program pembangunan ini.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jumanan selaku panitia pelaksanaan program meterisasi di tingkat dusun:

“Awalnya program ini bisa terlaksana karena kepala desa mengadakan rapat dengan para perangkat desa beserta dengan masyarakat setempat mengenai program pengadaan meterisasi air dan memberikan banyak pengarahan serta pemahaman mengenai pentingnya pembangunan meterisasi air tersebut. Beliau juga mengomunikasikan kepada kami bahwa selanjutnya setelah dibangun meterisasi ini nantinya penyaluran air akan berjalan lancar. Setelah itu beliau melakukan koordinasi dengan membentuk panitia pembangunan meterisasi. Komunikasi yang sudah dilakukan beliau kepada warga membuat kami merasa diajak untuk ikut serta dalam pembangunan ini, untuk itulah kami setuju dengan usulan beliau dan turut membantu dana secara swadaya dan siap juga memberikan bantuan tenaga untuk pembangunan ini”.

(Wawancara dilakukan di Balai Desa Jedong pada Rabu, 27 Juli 2016 pukul 10.18)

Pernyataan tersebut dilengkapi pula oleh Bapak Hariono selaku Ketua RW 01 dan panitia pelaksanaan meterisasi air:

“Menurut saya komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa terhadap masyarakatnya sudah bagus, terbukti dari bisa diajaknya masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan meterisasi air ini. Masyarakat sendiri juga percaya bahwa apa yang dikatakan beliau pada awal pengarahannya program ini mengenai pentingnya membangun meterisasi adalah untuk kepentingan seluruh warga. Karena sebelum adanya pengarahannya dan dukungan dari rapat yang diadakan oleh desa, masyarakat Desa Jedong memenuhi kebutuhan air dengan usaha sendiri dengan menampung air memanfaatkan sumur pribadi yang ada di rumah mereka agar kebutuhan air dapat terpenuhi”.

(Wawancara dilakukan di rumah ketua RW 01 pada hari Rabu, 27 Juli 2016 pukul 19.10)

Berdasarkan hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan baik mampu mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat Desa Jedong untuk turut ikut serta membantu dan memberikan kontribusi di dalamnya baik secara langsung maupun tidak. Adanya hubungan timbal balik antara penjelasan dan pengarahannya dari Kepala Desa Jedong dengan masyarakat yang bersangkutan menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemimpin mampu menampung aspirasi dan kepentingan warga setempat, sehingga didapatkan pula balasan yang positif berupa dukungan atau partisipasi dari masyarakat. Berikut adalah macam-macam bentuk partisipasi masyarakat Jedong dalam pembangunan meterisasi air, terdiri dari:

**a) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan program pembangunan meterisasi oleh kepala desa**

Salah satu tujuan terpenting dari partisipasi masyarakat adalah dalam proses pengambilan keputusan. Karena di dalam pengambilan keputusan tersebut masyarakat hendaknya diberikan suara dengan melibatkan secara langsung serta mendorongnya untuk dapat menyatukan tujuan antara masyarakat dan pemerintah atau pemimpin yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Jedong beserta perangkat dan masyarakat desa setempat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jumanan selaku panitia pelaksanaan program meterisasi tingkat dusun sebagai berikut:

“Pembuatan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa memang dengan melibatkan kami dalam rapat desa serta menanyakan apa saja usulan-usulan dari kami agar pembangunan meterisasi air ini dapat dilaksanakan. Kebanyakan dari kami sebagai warga mengaku menyetujui dan senang karena akhirnya ada program meterisasi air ini karena dengan begitu kami nantinya tidak akan merasa kesulitan lagi saat mendapatkan air. Untuk itu kami langsung menyetujui keputusan yang dibuat oleh Pak Sumariyadi, lagipula sikap Pak Kades juga terlihat santai, baik, ramah saat berbicara dengan masyarakat, tapi saya akui meskipun begitu beliau tetap memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan oleh desa khususnya air yang lancar supaya dapat digunakan sehari-hari”.

(Wawancara dilakukan di Balai Desa Jedong pada Rabu, 27 Juli 2016 pukul 10.18)

Hal lain ditunjukkan juga oleh Bapak Hariadi Selaku Ketua RW 01 sekaligus panitia pelaksanaan meterisasi air seperti berikut:

“Kalau menurut saya kepala desa itu memiliki sifat mau merangkul semua anggota masyarakat. Beliau sifatnya tidak semena-mena dan selalu ramah bahkan bisa diajak bercanda, jadi enak saja kalau berbicara dengan beliau itu tidak terlalu tegang. Waktu rapat pun bisa mencairkan suasana sehingga kami semua yang datang saat itu sama sekali tidak merasa sungkan untuk bertanya maupun memberikan usulan kepada beliau. Pelaksanaan program meterisasi air ini juga diputuskan dengan mempertimbangan pendapat-pendapat dari kami semua, bukan tiba-tiba diputuskan secara sepihak”.

(Wawancara dilakukan di rumah ketua RW 01 pada hari Rabu, 27 Juli 2016 pukul 19.13)

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa gaya kepemimpinan dari Kepala Desa Jedong adalah gaya kepemimpinan yang demokratis, hal ini dapat dilihat dari caranya dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pendapat dan usulan dari berbagai pihak sebelum memutuskannya serta lebih mengutamakan adanya kebersamaan dalam melakukan tugas-tugas beserta dengan perangkat dan masyarakat setempat. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Sumariyadi selaku Kepala Desa Jedong pada saat ditanya gaya kepemimpinan yang bagaimanakah yang diterapkan dalam pemerintahannya, sebagai berikut:

“Jika ditanya gaya kepemimpinan apa yang saya gunakan selama ini adalah tentu saja bisa dikatakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Saya rasa masyarakat Desa Jedong lebih cocok dipimpin dengan gaya yang demokratis seperti ini dengan cara turun langsung ke masyarakat untuk bersosialisasi, mengarahkan, memberikan penjelasan mengenai program pembangunan merupakan cara yang tepat. Karena dengan begitu mereka cepat lambat akan mengerti sehingga dapat dengan mudah digerakkan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan yang telah ada. Seperti halnya dengan program meterisasi air ini, pada awalnya saya hanya mendengar saja keluhan-keluhan dari mereka dan apa yang mereka inginkan, lalu jika sudah begitu baru merencanakan program dan mengajak mereka untuk ikut serta didalamnya supaya program dapat berjalan dan mereka pun dapat berpartisipasi aktif didalamnya. Masyarakat Desa Jedong pun pada dasarnya memiliki

sikap yang aktif dan inisiatif yang tinggi untuk dapat mewujudkan keinginan mereka mendapatkan air dengan lancar”.

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Jedong pada hari Rabu 26 Juli 2016 pukul 09.35)

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa Jedong tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan adalah gaya kepemimpinannya demokratis. Untuk itu dalam hal ini sudah pasti masyarakat berperan serta secara penuh dalam hal pengambilan keputusan. Terlebih lagi dijelaskan apabila warga desa juga diajak untuk berpartisipasi secara penuh agar program yang telah dibuat berjalan dengan lancar.

#### **b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan meterisasi air**

Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan dalam hal pelaksanaan program pembangunan meterisasi air. Seluruh warga masyarakat berperan didalamnya terutama panitia yang sudah dibentuk oleh kepala desa untuk pelaksanaan pembangunan meterisasi air. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini bentuknya bermacam-macam, mulai dari menyumbang dana pengelolaan sampai dengan menyumbang tenaga untuk membangun meterisasi air. Berikut hasil wawancara dengan beberapa warga mengenai partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan meterisasi air. Bapak Jumanan selaku panitia pelaksanaan program meterisasi tingkat dusun mengatakan sebagai berikut:

“Banyak sekali partisipasi yang dilakukan oleh warga dalam pelaksanaan pembangunan meterisasi air ini. Untuk tiap-tiap warga diadakan penarikan iuran yang digunakan untuk pembelian alat-alat,

jumlahnya secara sukarela saja. Kemudian pemasangan meterisasi air dilakukan oleh bapak-bapak dilingkungan setempat secara bersama-sama sesuai dengan instruksi dari panitia terkait. Untuk pemasangannya dilakukan per RT. Sedangkan ibu-ibu seperti biasanya menyumbang konsumsi secara sukarela untuk mendukung kegiatan pemasangan meterisasi air”.

(Wawancara dilakukan di Balai Desa Jedong pada Rabu, 27 Juli 2016 pukul 10.22)

Hal tersebut dilengkapi oleh pendapat dari Bapak Hariadi Selaku Ketua RW 01 sekaligus panitia pelaksanaan meterisasi air seperti berikut:

“Pelaksanaan program meterisasi air ini berlangsung mulai dari bulan Oktober tahun 2014. Pelaksanaannya berdasarkan atas program kepala desa, namun untuk pengadaan peralatan dilakukan secara swadaya dari masyarakat dengan memberikan iuran untuk membeli alat meterisasi air, jumlahnya tergantung pada kemampuan tiap-tiap warga. Pelaksanaannya dengan membentuk panitia di tiap-tiap RW, namun untuk penarikan iuran per bulan dilakukan dan dikumpulkan per RT. Untuk pelaksanaannya Pak Kades memantau secara langsung dan mengawasinya. Harga pokok yang diberikan untuk dibayarkan setiap bulan adalah Rp 4000 namun tiap RW menarik Rp 5000 sebab Rp 1000 akan digunakan untuk kas desa. Sampai dengan sejauh ini pelaksanaan pembangunan ini masih belum selesai dikarenakan kekurangan biaya”.

(Wawancara dilakukan di rumah ketua RW 01 pada hari Rabu, 27 Juli 2016 pukul 19.17)

Adapula pendapat dari beberapa warga desa setempat mengenai pelaksanaan pembangunan meterisasi air seperti pendapat dari Bapak

Andik selaku ketua RT 02 RW 10 sebagai berikut:

“Di daerah saya sendiri pelaksanaan meterisasi air sudah dilakukan kira-kira awal tahun 2015. Warga sendiri menyambut antusias pembangunan meterisasi air ini dengan ikut turut serta membantu pembangunannya, adapula yang menyumbang iuran lebih untuk pembelian peralatan meterisasi air. Begitu pula dengan warga lain yang menyumbang makanan pada saat kegiatan pembangunan berlangsung. Untuk iurannya sampai sekarang berjalan dengan lancar dan setiap enam bulan sekali diwajibkan untuk merekap karena dalam jangka waktu satu tahun akan ada rapat”.

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 28 Juli 2016)

Berdasarkan beberapa pendapat dari warga Desa Jedong dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan meterisasi air berjalan dengan lancar dan dilakukan sendiri oleh warga desa secara bergotong-royong. Namun ditemukan kendala bahwa pembangunan meterisasi air yang sampai saat ini belum selesai disebabkan oleh terbatasnya dana yang dimiliki oleh desa dan hasil dari swadaya masyarakat. Bentuk partisipasi warga dalam pelaksanaan pembangunan meterisasi air ini juga ada bermacam-macam, ada yang berpartisipasi secara aktif dengan cara ikut membangun dan memasang meterisasi, dan ada pula yang berpartisipasi dengan memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun makanan.

**c) Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat pembangunan meterisasi air**

Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat ini memiliki pengertian manfaat apa saja yang sudah didapatkan setelah dilaksanakannya pembangunan meterisasi air bagi masyarakat setempat. Hal ini perlu diketahui sebab hasil pemanfaatan tersebut selanjutnya akan dapat dimanfaatkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan baik dari segi manfaat sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jumanan selaku panitia pelaksanaan program meterisasi tingkat dusun mengatakan sebagai berikut:

“Manfaat yang didapatkan warga setelah adanya pembangunan meterisasi air tentunya penyaluran air yang lebih lancar, tidak ada kecurangan atau pembelokan air seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dan kalau menurut saya pribadi tidak perlu lagi repot-repot menampung air dan menunggu air mengalir pada jam-jam tertentu. Karena sebelum adanya meterisasi ini penggunaan air dibatasi mulai dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 09.00 pagi, disaat-saat itulah warga harus menampung airnya untuk kebutuhan sehari-hari sementara air tidak bisa didapatkan dalam jumlah yang banyak pula”.

(Wawancara dilakukan di Balai Desa Jedong pada Rabu, 27 Juli 2016 pukul 10.25)

Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat warga desa lain seperti pendapat Bapak Hariadi Selaku Ketua RW 01 sekaligus panitia pelaksanaan meterisasi air seperti berikut:

“Menurut saya cukup memudahkan adanya meterisasi air di Desa Jedong ini. Dari kecil saya tinggal di Desa Jedong ini sampai dengan sekarang sudah jauh sekali berkembang, khususnya untuk masalah mendapatkan air sekarang sudah semakin mudah saja. Kalau dahulu untuk mendapatkan air saja warga harus menuju sungai terdekat, bagi warga yang memiliki sumur di rumahnya mungkin tidak terlalu sulit. Kemudian setelah itu berkembang dengan dibangunnya tandon di beberapa titik desa beserta pipanisasi untuk penyaluran airnya itu sudah lebih ringan lagi dalam memperoleh air. Air biasanya dialirkan dengan membuka tandon-tandon tersebut di jam-jam tertentu, pagi hari mengalir mulai pukul 06.00 pagi sampai pukul 09.00 dan biasanya malam harinya juga dialirkan dengan membuka tandon sekitar pukul 19.30. Sekarang dengan adanya meterisasi air ini warga tidak perlu lagi menunggu di jam-jam tertentu dan menyediakan tempat seperti bak, ember, gentong dan lainnya untuk menampung air yang mengalir”.

(Wawancara dilakukan di rumah ketua RW 01 pada hari Rabu, 27 Juli 2016 pukul 19.20)

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Bapak Andik selaku ketua RT 02 RW 10 sebagai berikut:

“Meterisasi air yang dipasang di rumah-rumah warga tentu saja memberikan manfaat yang besar. Dengan adanya pembangunan ini sudah sedikit sekali warga yang mengeluh tidak dapat air karena telat dalam menampung air di jam-jam tertentu. Dan juga sekarang ada

beberapa warga yang memanfaatkan pembangunan meterisasi air ini untuk usaha budidaya ikan lele dan cuci motor. Jadi saya rasa besar manfaatnya untuk memutuskan membangun meterisasi air di Desa Jedong ini meskipun dalam pengelolaan masih minim karena kekurangan dana”.

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 28 Juli 2016)

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Ibu Sulik selaku warga RT 03 RW 04 Desa Jedong sebagai berikut:

“Semenjak ada pembangunan meteran di Desa Jedong sekarang sudah tidak perlu repot untuk menampung air, dan yang paling penting itu tidak repot lagi kalau mau cuci baju. Biasanya Ibu-ibu disini dulu kalau cuci baju nunggu airnya mengalir atau kalau yang dekat dengan sungai yang mencuci disana, itu terjadi sebelum adanya pipanisasi dan pemberlakuan meteran air. Untuk harga iuran per bulan juga tidak ada masalah karena rata-rata semua sama bayar Rp 5000 kecuali untuk rumah-rumah yang menggunakan pompa untuk mendapatkan air itu mungkin lebih mahal harganya”.

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 28 Juli 2016)

Dari beberapa pendapat warga Desa Jedong tersebut dapat diketahui jika dengan adanya program meterisasi ini dapat mempermudah kegiatan mereka sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan akan air. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga Desa Jedong baik dari segi sosial, ekonomi dengan adanya usaha-usaha kecil yang dibuka oleh beberapa warga seperti budidaya ikan dan usaha cuci motor, serta dari segi kesehatan dengan adanya air bersih yang terpenuhi untuk kebutuhan vital sehari-hari. Partisipasi masyarakat secara nyata dalam menerima pemanfaatan pembangunan meterisasi air ini adalah dengan membayarkan iuran yang sudah ditentukan setiap bulannya.

**d) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan meterisasi air**

Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat awal pembuatan keputusan dan pelaksanaan program, namun juga diperlukan pada saat evaluasi program dengan maksud untuk terlibat dalam pengawasan dan penilaian hasil sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan apabila terjadi penyimpangan dapat dengan segera diperbaiki. Adapun pendapat dari Bapak Jumanan selaku panitia pelaksanaan program meterisasi tingkat dusun mengatakan sebagai berikut:

“Evaluasi pembangunan meterisasi yang sudah berjalan dilakukan oleh warga setempat memang sebagian besar mengaku terbantu dalam penyediaan sumber air untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun masih terdapat juga keluhan dari beberapa warga yang mengalami kesusahan mendapat air karena setelah ditelusuri saluran pipanisasi warga tersebut tersumbat atau menumpuk dengan milik warga lain sehingga airnya tidak mau mengalir lagi. Hal tersebut sudah dilaporkan pada RT setempat dan diadakan penggalian ulang untuk memperbaikinya. Mungkin itu saja evaluasi dari beberapa warga yang mengalami kendala, selebihnya sampai sekarang belum ada lagi masalah lainnya”.

(Wawancara dilakukan di Balai Desa Jedong pada Rabu, 27 Juli 2016 pukul 10.29)

Pendapat tersebut dilengkapi dengan pendapat Bapak Hariadi selaku Ketua RW 01 sekaligus panitia pelaksanaan meterisasi air seperti berikut:

“Secara keseluruhan pembangunan meterisasi air ini sudah berjalan dengan lancar menurut saya hanya perlu dilakukan pengelolaan yang baik saja oleh warga. Dan selebihnya agar sesegera mungkin wilayah yang belum dibangun meterisasi air dapat segera dibangun agar pemenuhan air secara merata didapatkan oleh warga Desa Jedong. Namun untuk akhir-akhir ini terdapat keluhan dari beberapa warga yang sudah ditampung oleh Kepala Desa mengenai kecilnya aliran air yang mengalir dan akan segera dicari tahu apa penyebabnya”.

(Wawancara dilakukan di rumah ketua RW 01 pada hari Rabu, 27 Juli 2016 pukul 19.24)

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Ibu Sulik selaku warga RT 03 RW 04 Desa Jedong sebagai berikut:

“Kalau di rumah saya tidak ada masalah apapun, air mengalir tetap lancar. Tapi beberapa hari ini memang aliran airnya sedikit lebih kecil dari biasanya. Beberapa hari yang lalu memang saya liat Pak RT dan warga lainnya melakukan penggalian memperbaiki pemasangan pipa, katanya ada pipa yang bermasalah sehingga ada beberapa rumah yang tidak dapat terliri air sementara waktu”.

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 28 Juli 2016)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diketahui jika secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan meterisasi air sudah berjalan dengan baik. Namun terlepas dari hal itu ada beberapa hal kecil yang dapat dijadikan evaluasi bagi panitia pelaksanaan pembangunan meterisasi dari beberapa warga seperti, aliran air berubah menjadi kecil dan ada dari salah satu rumah warga yang sudah terpasang alat meterisasi namun air tidak dapat mengalir. Akan tetapi dengan adanya komunikasi yang baik antara warga dengan panitia pembangunan setempat sehingga masalah-masalah tersebut sudah berusaha untuk diselesaikan dengan cara penggalian ulang untuk mengetahui apa yang menjadi sebab air tidak mengalir secara lancar.

### **3. Kendala-Kendala yang Dihadapi untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Meterisasi Air**

Pelaksanaan pembangunan meterisasi air di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ini tidak terlepas dari adanya berbagai kendala di dalamnya. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat seperti komunikasi, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan masyarakat setempat. Adapun uraian wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Jedong, Bapak Sumariyadi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Kendalanya antara lain ya berhubungan dengan komunikasi yang kami lakukan dengan masyarakat. Untuk inisiatif mereka datang dalam kegiatan rapat seperti musrenbang dan RKP-Desa memang tinggi keterwakilannya, tapi untuk menjelaskan kepada mereka akan pentingnya pembangunan meterisasi air ini awalnya memang sulit. Perlu dilakukan pengarahan tentang pentingnya air, dijelaskan apa itu alat meteran air dan kegunaanya bagi mereka. Ya intinya harus membuat mereka paham akan program pembangunan meterisasi air ini sendiri bagi kepentingan mereka. Kalau sudah paham mereka akan mudah mengikuti langkah-langkah tiap programnya. Kesulitan komunikasi dengan warga memang karena pendidikan warga yang rata-rata disini hanya sampai tingkat SD dan SMP, kecuali warga pendatang yang tinggal dan menetap disini. Warga pendatang biasanya lebih banyak mengajukan usulan pembangunan daripada warga asli sini. Kalau warga desa sini harus dijelaskan secara perlahan-lahan supaya mengerti. Untuk itu biasanya kami adakan penyuluhan kepada warga di balai desa ini. Penyuluhan tersebut juga biasanya diadakan oleh mahasiswa yang PKL dan sedang melakukan kegiatan KKN di Desa Jedong ini”.

(Wawancara dilakukan pada Hari Jumat, 12 Agustus 2016 pukul 10.48)

Kendala lainnya yang ada dalam pembangunan meterisasi air ini adalah mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Jedong selanjutnya sebagai berikut:

“Selain tingkat pendidikan kendala lainnya adalah tingkat pendapatan warga Desa Jedong sendiri. Terlepas dari dana yang dimiliki oleh pemerintah Desa Jedong, pembangunan meterisasi air ini adalah swadaya yang dilakukan oleh warga karena dana yang tidak mencukupi tersebut. Untuk pembangunan yang sampai saat ini belum selesai kendalanya memang berasal dari dana. Meskipun ada swadaya dari masyarakat termasuk iuran untuk membeli alat meteran, namun masih ada beberapa warga yang belum memasang meteran dirumahnya

karena dirasa untuk membeli alat meteran air itu masih belum mencukupi biayanya. Memang mata pencaharian warga disini kebanyakan adalah buruh pabrik, kuli bangunan, petani, dan peternak. Untuk itu hasil iuran bulanan penggunaan air nantinya akan digunakan juga selain untuk pengelolaan juga untuk membantu warga-warga yang belum bisa membeli alat meteran”.

(Wawancara dilakukan pada Hari Jumat, 12 Agustus 2016, pukul 10.52)

Hal tersebut dilengkapi pula dengan data yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan warga Desa Jedong seperti berikut ini:

Tabel 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Desa Jedong

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum Sekolah	765 jiwa
2	Tidak Pernah Sekolah	349 jiwa
3	Tidak Tamat SD/MI	2381 jiwa
4	Tamat SD/MI	1980 jiwa
5	Tamat SMP/MTs	981 jiwa
6	Tamat SMA/MA	219 jiwa
7	Tamat PT/Universitas	73 jiwa
JUMLAH		6748 jiwa

Sumber: Kantor Desa Jedong-Profil Desa 2010 (diolah)

Tabel 4: Macam Mata Pencaharian Penduduk Di Desa Jedong

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani / Buruh Tani	1727 jiwa
2	Peternak	836 jiwa
3	Buruh pabrik	1526 jiwa
4	PNS	141 jiwa

5	Pegawai Swasta	136 jiwa
6	Lain-lain	262 jiwa

Sumber: Kantor Desa Jedong-Profil Desa 2010 (diolah)

Berdasarkan pada data tersebut tingkat pendidikan warga Desa Jedong tergolong rendah dikarenakan sebagian besar penduduk Desa Jedong tidak tamat Sekolah Dasar dan bahkan ada beberapa diantaranya yang tidak sekolah. Tingkat pendapatan mereka juga dapat dikatakan tergolong rendah dikarenakan pekerjaan mereka yang sebagian besar adalah buruh tani dan buruh pabrik mendominasi di Desa Jedong ini.

### C. Pembahasan

#### 1. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipatif

Dalam melaksanakan sebuah program desa, yang perlu diperhatikan adalah kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau bersama-sama turut serta dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan. Setiap program pembangunan yang ada di desa, kepala desa selaku pelaksana pemerintahan di desa merupakan pemimpin formal yang dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pembangunan di desanya. Dalam hal ini adalah pembangunan metersisasi air di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Dalam pembangunan meterisasi air di Desa Jedong ini, kepala Desa Jedong melakukan tugasnya dengan menggunakan gaya kepemimpinan

demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis berdasarkan teori Path Goal versi House menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif selalu berusaha untuk meminta dan menggunakan saran-saran dari para bawahannya. Hal tersebut sesuai dengan sifat dari Kepala Desa Jedong yang selalu menampung usulan-usulan yang diberikan kepadanya dan untuk selanjutnya akan diambil keputusan berdasarkan usulan-usulan tersebut. Gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan sesuai dengan ciri-ciri kepemimpinan demokratis seperti yang dikemukakan oleh Sukanto dalam Dimiyati (2014:74) yaitu:

1. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin.
2. Kegiatan-kegiatan yang didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih.
3. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang telah ada dari fokus maka peneliti akan membahas hal tersebut sebagai berikut:

**a) Pemberian pengarahan program pembangunan meterisasi air oleh kepala desa kepada perangkat desa dan masyarakat setempat.**

Pengarahan merupakan salah satu fungsi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Siagian dalam Pasolong (2008:23-30) pada poin pertama (1) yaitu pimpinan sebagai penentu arah dapat diartikan bahwa setiap organisasi atau birokrasi dibentuk sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya jangka panjang atau jangka pendek. Tujuan dalam organisasi tersebut tidak akan tercapai apabila masing-masing anggota bertindak sendiri-sendiri tanpa ditentukan arah dari pimpinan. Arah yang dimaksudkan adalah strategi dan taktik yang telah disusun dan dijabarkan oleh birokrasi tersebut.

Sesuai dengan pengertian Siagian bahwa pemimpin sebagai penentu arah berhak untuk menyusun strategi dan taktik yang akan digunakan pada saat pembangunan. Hal ini sesuai dengan perilaku Kepala Desa Jedong yang pada tahap awal melakukan pengarahan dengan cara langsung kepada masyarakat yaitu pada saat musyawarah rembug desa dan pada saat musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan membahas tujuan dan pentingnya pembangunan meterisasi air di Desa Jedong. Dalam pengarahan tersebut Kepala Desa Jedong juga bersifat memberikan penjelasan mengenai apa meterisasi air itu dan apa manfaatnya dengan mengajak dan ikut turut berperan serta dalam pembangunan meterisasi air ini nantinya. Dari awal pengarahan yang

diberikan oleh kepala desa, kita dapat mengetahui bahwa kepemimpinan Kepala Jedong juga bersifat demokratis.

Kepemimpinan demokratis yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Jedong sesuai dengan inti pokok dari teori Path Goal yang berusaha untuk menjelaskan perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahan. Dalam hal pengarahan ini inti teori Path Goal yang sesuai dengan kepemimpinan kepala desa adalah pemimpin mampu memberikan pengaruh dan motivasi kepada bawahan dan masyarakat Desa Jedong untuk mau menjalankan program pembangunan meterisasi air ini.

Motivasi yang berupa pengarahan yang dilakukan Kepala Desa Jedong kepada para perangkat desa dan masyarakat ini merupakan suatu petunjuk bagi masyarakat untuk memahami secara baik manfaat metersisasi air tersebut, sehingga akan muncul kemauan dari dalam diri masyarakat untuk berpartisipasi aktif didalamnya tanpa adanya paksaan, rasa segan kepada kepala desa dan bersifat sukarela. Jadi pemberian motivasi dan arahan tersebut dapat menjadi efektif ketika dapat dijadikan panutan dan acuan bagi warga, khususnya perangkat desa dan masyarakat yang tergabung di dalam panitia pembangunan meterisasi air ini baik yang berada ditingkat desa maupun yang berada di tingkat dusun.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan dan gaya kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat

mengarahkan sehingga masyarakat mampu untuk mengikuti apa yang akan dilakukan sesuai dengan arahan dari pemimpinnya. Partisipasi masyarakat Desa Jedong bisa muncul juga karena mereka memahami apa yang disampaikan dalam pengarahan yang diberikan kepala desa dalam hal pembangunan meterisasi air. Ini sesuai dengan pendapat dari Maskun dalam Solekhan (2014:164) mengenai partisipasi masyarakat yang bentuknya bertingkat-tingkat sesuai dengan poin (1) yang menyebutkan terdapatnya pemahaman timbal balik (mutual understanding) antara perangkat pemerintah dengan masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya pemahaman tersebut masyarakat akhirnya mau untuk turut serta dalam program pembangunan meterisasi air di Desa Jedong.

**b) Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi oleh kepala desa kepada perangkat desa dan masyarakat setempat.**

Menurut G.R. Terry dalam Arifin (2012:95) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Handoko dalam Arifin (2012:96) disebutkan bahwa kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Sehingga antara

koordinasi dan komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, selain itu juga antara koordinasi dan kepemimpinan juga tidak dapat dipisah satu sama lain, karena satu sama lainnya saling mempengaruhi.

Melakukan koordinasi dan komunikasi merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang telah disebutkan oleh Keating dalam Pasolong (2008:21-22) pada poin (a) yang berkaitan dengan koordinasi yaitu mengatur (*regulating*) untuk mengatur arah kegiatan dan langkah yang dilakukan oleh kelompok. Dalam hal ini di dalam penyajian data telah disebutkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong adalah dengan cara membentuk panitia dalam pembangunan meterisasi air. Panitia pembangunan tersebut dibagi menjadi dua yaitu panitia yang berada di tingkat desa dengan anggota-anggotanya terdiri atas para perangkat desa dan kelompok masyarakat terkait seperti LKMD dan karang taruna yang ada di Desa Jedong. Selanjutnya adalah panitia yang berada di tingkat dusun yang terdiri dari warga di tingkat RT, ketua RT yang dikelompokkan menjadi per RW nantinya dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan meterisasi air.

Selain koordinasi, tugas lain yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mampu berkomunikasi yang baik dengan bawahan dan masyarakatnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Keating dalam Pasolong (2008:21-22) pada poin (c) yang berkaitan dengan komunikasi yaitu memberitahu (*informating*) yang berupa pemberian informasi, data, fakta,

dan pendapat apabila para anggota meminta dan memerlukannya. Hal tersebut juga diungkapkan dalam fungsi seorang pemimpin menurut Siagian dalam Pasolong (2008:23-30) pada poin (3) yaitu pimpinan sebagai komunikator dimana disampaikan bahwa berbagai keputusan yang diambil disampaikan kepada pelaksana harus melalui komunikasi. Bahkan sesungguhnya interaksi yang terjadi diantara atasan sesama petugas pelaksana kegiatan operasional dimungkinkan terjadi dengan baik berkat adanya komunikasi yang efektif.

Tugas dan fungsi pemimpin tersebut telah dipenuhi oleh Kepala Desa Jedong selaku pemimpin pemerintahan desa yaitu dengan cara pembentukan panitia yang sudah terkoordinasi sebelumnya maka akan memungkinkan terjadinya komunikasi yang baik antara kepala desa dengan panitia pelaksana pembangunan meterisasi air. Dan wujud komunikasi itu dapat dilihat dari adanya rapat atau musyawarah desa dalam pelaksanaan meterisasi air, serta pemberian arahan pada awal penyusunan program meterisasi air ini. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong ini dapat dikatakan baik karena mampu menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat setempat sehingga mau untuk berpartisipasi secara sukarela dalam pembangunan meterisasi air ini.

Seyogyanya, koordinasi dan komunikasi antara Kepala Desa dengan panitia pelaksana pembangunan meterisasi air ini harus tetap dipertahankan agar partisipasi yang telah tumbuh dalam masyarakat tidak

serta-merta hilang karena kendala komunikasi dan koordinasi yang tidak baik. Tugas dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa Jedong dalam pengkoordinasian dan pemberian komunikasi ini dilakukan dengan cara atau gaya demokratis/partisipatif.

Sesuai dengan ciri pemimpin yang demokratis yang dikemukakan oleh Sukanto dalam Dimiyati (2014:74) pada poin (2) yaitu kegiatan-kegiatan yang didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. Hal tersebut telah dilakukan oleh Kepala Desa Jedong seperti selalu mengadakan rapat dengan panitia pelaksana pembangunan dan mendiskusikan pengadaan alat, biaya, dan cara pelaksanaan pembangunan meterisasi air ini. Serta pada poin (4) yaitu, para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. Kepala Desa Jedong membagi panitia pembangunan meterisasi air kedalam kelompok panitia desa dan panitia dusun, serta membebaskan pemilihan orang-orang yang ada dalam kelompok panitia tersebut. Pengelompokan tersebut dilakukan dengan tujuan agar pembagian tugas yang diberikan dapat terkoordinir dan terlaksana secara baik.

**c) Pengambilan keputusan oleh kepala desa dengan melibatkan masyarakat setempat.**

Administrasi publik menurut Siagian dalam Syafri (2012:25) merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan negara. Melihat dari pengertian administrasi publik tersebut maka pencapaian tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan merupakan arti penting yang perlu digarisbawahi dari administrasi publik. Untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan tersebut maka perlu adanya wadah atau organisasi yang menaungi dibawahnya, dalam hal ini adalah organisasi publik. Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki peran penting dan didirikan dengan tujuan agar mampu untuk mewujudkan keinginan dari berbagai pihak didalamnya.

Setiap organisasi tentunya harus mampu untuk membuat pengambilan keputusan yang nantinya akan membawa keberhasilan tujuan dari organisasi itu sendiri. Pengambilan keputusan tersebut bermaksud untuk mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan dengan berbagai konflik sehingga usaha untuk mencapai tujuan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan ini sangatlah penting dikarenakan keputusan yang diambil haruslah dapat membawa keberhasilan bagi organisasinya dan seorang pemimpin juga harus berani bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah diambilnya. Oleh karena itu pemimpin dalam

organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Terlebih lagi cara dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dapat mencerminkan karakter dan gaya kepemimpinan yang dipakai oleh pemimpin tersebut.

Pemimpin dalam konteks ini adalah Kepala Desa Jedong. Dalam pengambilan keputusan Kepala Desa Jedong selalu melibatkan pendapat dari masyarakat. Semua hal ini sesuai dengan ciri-ciri kepemimpinan demokratis yang disampaikan oleh Sukanto dalam Dimiyati (2014:74) pada poin pertama (1) yaitu, semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. Hal tersebut terbukti dari diadakannya rapat musyawarah desa yang mengajak semua lapisan masyarakat untuk turut serta di dalamnya. Dalam rapat tersebut kepala desa mendengarkan semua usulan yang berasal dari masyarakat baik berupa kritik maupun saran yang disampaikan kepadanya, untuk selanjutnya akan dijadikannya pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kepala desa akan melakukan pengambilan keputusan dengan para perangkat desanya. Keputusan yang diambil selain didasarkan pada masukan-masukan dari masyarakat juga didasarkan pada permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Proses pengambilan keputusan Kepala Desa Jedong yang bersifat demokratis tersebut terlihat disetiap sikapnya saat mengikutsertakan baik perangkat desa dan masyarakatnya untuk berpartisipasi. Di setiap

program-program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Jedong, Kepala Desa Jedong selalu mendahuluinya dengan mengadakan rapat atau musyawarah desa rutin untuk membahas program tersebut. Sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan, pendapat, ide, maupun kritik pada saat musyawarah dilakukan.

**d) Pemberian pengawasan oleh kepala desa kepada panitia pelaksanaan pembangunan meterisasi air.**

Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan (Simbolon, 2004:61). Sesuai dengan pengertian pengawasan tersebut diatas maka dapat dikatakan proses pengawasan merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Apabila tidak ada pengawasan maka tidak akan ada jaminan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar. Macam-macam pengawasan menurut Siagian (2003:115-116) ada dua macam yaitu (1) Pengawasan langsung (*direct control*) adalah pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan organisasi terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berupa inspeksi secara langsung yang meliputi pelaksanaan tugas dan kedisiplinan bawahan dalam menjalankannya, dan (2) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Bentuknya berupa

laporan yang disampaikan oleh bawahan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong kepada panitia pelaksanaan program pembangunan meterisasi air ini dilakukan melalui dua acara, yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong adalah dalam bentuk peninjauan di beberapa wilayah yang pada saat itu melaksanakan kegiatan pembangunan meterisasi. Namun tidak semua wilayah diawasi secara langsung oleh kepala desa dikarenakan masih banyaknya tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh Kepala Desa Jedong. Selanjutnya adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara tidak langsung, pengawasan dalam bentuk ini secara rutin dilakukan oleh Kepala Desa Jedong dengan mewajibkan masing-masing RW harus melaporkan hasil iuran air bersih setiap enam bulan sekali agar pelaksanaan meterisasi air ini dari segi administrasi dapat dikontrol antara iuran yang dibayarkan dengan penggunaan air yang digunakan oleh tiap-tiap rumah tangga.

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Jedong tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa Jedong juga telah melaksanakan fungsi pokok kepemimpinan menurut Veithzal Rivai dalam Arifin (2012:103) poin kelima (5) yaitu, fungsi pengendalian yang bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga

memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong bertujuan untuk memantau jalannya pembangunan meterisasi dan menghindari adanya pelaksanaan yang menyimpang dalam pembangunan ini sehingga penting pula apabila kepala desa melaksanakan fungsi pengendalian dengan cara meminta laporan dari iuran pembayaran air bersih selama enam bulan sekali dan melakukan musyawarah dengan panitia program meterisasi air agar seluruh kegiatan baik yang sudah terlaksana ataupun belum dapat terpantau dengan jelas.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Meterisasi Air**

Partisipasi memiliki arti keikutsertaan atau keterlibatan secara sadar dan sukarela untuk berkontribusi secara fisik maupun non fisik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan (Solekhan, 2014:144). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan sikap aktif untuk turut ikut serta dalam program pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga tahap pengawasan. Untuk menumbuhkan partisipasi diantara masyarakat diperlukan seorang pemimpin yang mampu menggerakkan dan mendorong kemauan untuk berpartisipasi di kalangan masyarakat yang dalam hal ini adalah kepala desa.

Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk dapat turut serta aktif dalam program pembangunan meterisasi air. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang desa, UU nomor 6 tahun 2014, pasal 26 ayat 2 tentang tugas kepala desa pada poin “m” disebutkan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Sesuai dengan pasal tersebut berarti kepala desa diharuskan untuk mengikutsertakan masyarakat desa setempat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Hal tersebut dapat terlihat dari gaya kepemimpinan demokratis yang digunakan oleh Kepala Desa Jedong dalam setiap usahanya mulai dari pengarahan, koordinasi dan komunikasi, pengambilan keputusan, sampai dengan pengawasan terhadap pembangunan meterisasi.

Gaya kepemimpinan demokratis yang digunakan oleh Kepala Desa Jedong sesuai dengan teori gaya kepemimpinan situasional milik Hersey dan Blanchard. Menurut Hersey dan Blanchard dalam Pasolong (2008:48), kepemimpinan situasional dibagi menjadi empat yaitu: (1) Gaya instruksi pemimpin, (2) Gaya konsultasi pemimpin, (3) Gaya partisipasi pemimpin, dan (4) Gaya Delegasi pemimpin. Dari keempat gaya kepemimpinan situasional tersebut yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Jedong adalah gaya instruksi, gaya konsultasi pemimpin, dan gaya partisipasi pemimpin.

Gaya instruksi pemimpin ditunjukkan oleh kepala desa pada saat pembentukan panitia pelaksanaan pembangunan meterisasi air. Kepala

desa memutuskan untuk membentuk panitia yang berkedudukan di tingkat desa dan panitia yang berkedudukan di tingkat dusun. Pembentukan panitia tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses koordinasi dan pemberian instruksi yang berkaitan dengan pembangunan meterisasi air.

Gaya konsultasi pemimpin ditunjukkan pada saat kepala desa mengadakan rapat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) yang membahas rencana program pembangunan meterisasi air. Pada rapat tersebut kepala desa menyampaikan bagaimana pentingnya meterisasi agar penyediaan air untuk warga dapat terpenuhi secara lancar, untuk itu perlu dilakukan pembangunan meterisasi air. Pada rapat musyawarah bulanan yang diadakan oleh desa setelah adanya pelaksanaan pembangunan meterisasi air, kepala desa selaku pemimpin kembali menanyakan apa saja usulan terkait pembangunan dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepala desa sebagai masukan diterima agar dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi.

Gaya partisipasi pemimpin ditunjukkan pada saat kepala desa melakukan pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan meterisasi air ini. Saat itu masyarakat diberikan kebebasan untuk mengkritik ataupun menambahkan ide dalam proses pelaksanaan program meterisasi air, seperti diskusi mengenai bagaimana pengadaan alat meterisasi apabila dana yang dimiliki belum dapat terpenuhi untuk melakukan pembangunan, maka masyarakat beserta perangkat desa setuju untuk melakukan program ini atas dasar swadaya dari masyarakat sendiri.

Keputusan tersebut berdasarkan pada usulan dan pendapat dari masyarakat setempat yang ikut berpartisipasi bukan atas keputusan sepihak dari Kepala Desa Jedong.

Sesuai dengan penjabaran ketiga gaya yang dilakukan oleh kepala desa tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat selalu dilibatkan didalamnya. Peran kepemimpinan kepala desa untuk selalu memberikan arahan dan melakukan komunikasi dengan masyarakat mampu menggerakkan masyarakat Desa Jedong untuk turut memberikan partisipasinya mulai dari proses awal adanya gagasan pembangunan sampai dengan pada terbentuknya gagasan tersebut sebagai sebuah bangunan merupakan jenis partisipasi yang dilakukan sepanjang proses atau yang dinamakan dengan partisipasi prosesional, sesuai dengan apa yang dikemukakan Ndraha dalam Solekhan (2014:152) yang terdapat pada poin satu (1).

**a) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan program pembangunan meterisasi air**

Salah satu tujuan terpenting dalam partisipasi masyarakat adalah dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Sanoff dalam Adiyoso (dalam Solekhan 2014:142), bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Sesuai dengan penyajian data sebelumnya maka bentuk partisipasi warga Desa Jedong dalam pengambilan keputusan adalah dengan mengikuti rapat musyawarah desa yang diadakan serta turut ikut dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap satu tahun sekali. RKP-Desa diadakan untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dituntut untuk hadir didalamnya dikarenakan penyusunan program pembangunan desa khususnya program meterisasi air ini yang lebih mengetahui kebutuhan pembangunan meterisasi air ini mendesak untuk segera dilakukan atau tidak adalah masyarakat Desa Jedong sendiri. Selanjutnya apabila masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan diharapkan pembangunan meterisasi air sendiri dapat terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan warga sehingga tidak terdapat dampak buruk pada masyarakat Desa Jedong dan lingkungan apabila pembangunan meterisasi air ini dilaksanakan.

**b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan meterisasi air.**

Partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sedangkan pengertian *partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat local* (Adisasmita, 2013:78). Sesuai dengan pengertian dari Adisasmita tersebut, dimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk seperti sumbangan ide atau gagasan, sumbangan materi, sumbangan tenaga, dan memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan ide atau gagasan secara nyata dapat terlihat dari pengakuan beberapa warga Desa Jedong yang diberikan ruang oleh kepala desa untuk turut serta dalam musyawarah desa baik dalam musyawarah penyusunan program meterisasi air hingga kesempatan untuk bertanya apa guna dan pentingnya meterisasi air bagi kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk materi warga juga memberikan kontribusinya berupa pembelian secara swadaya alat meterisasi air per RT dengan tariff dan iuran yang disesuaikan dengan kemampuan warga. Sedangkan dalam pembangunannya para warga laki-laki turut membantu dengan menggali dan memasang pipa untuk saluran air dan alat meterisasi dengan memasangnya di tiap-tiap rumah warga, hal tersebut dilakukan secara gotong-royong per RT setempat. Sedangkan untuk warga perempuan atau ibu-ibu menyumbangkan makanan dan

minuman secara sukarela untuk konsumsi warga dalam proses membangun meterisasi air. Bentuk lain dalam pelaksanaan pembangunan meterisasi air ini dalam bentuk pemanfaatan pelayanan adalah pemberian iuran rutin yang dilakukan oleh warga sebesar Rp5000 untuk biaya pengelolaan alat meterisasi air yang dikelola di tiap-tiap RT yang lalu direkap hasilnya per RW untuk dibuat laporannya dan diserahkan kepada panitia desa agar dapat dikontrol pelaksanaannya oleh kepala desa.

**c) Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat pembangunan meterisasi air.**

Pelaksanaan pembangunan di pedesaan memiliki ruang lingkup yang luas seperti yang dikatakan oleh Adisasmita (2013:59) bahwa pembangunan pedesaan itu mempunyai lima ruang lingkup yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, dan lingkungan pemukiman), (2) Pemberdayaan masyarakat, (3) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), (4) Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap daerah pedesaan yang miskin) dan (5) Peningkatan keterkaitan antar daerah pedesaan dan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan.

Pembangunan meterisasi air di Desa Jedong ini dapat dikatakan memenuhi ruang lingkup pembangunan nomer satu (1), yaitu

pembangunan sarana dan prasarana pedesaan yang meliputi pengairan yang digunakan untuk kepentingan desa. Dan juga aspek nomor tiga (3), yaitu aspek dalam pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dikatakan sebagai pengelolaan sumber daya alam karena air yang didapatkan di Desa Jedong ini bersumber dari mata air alami yang diambil dari aliran sumber dan sungai yang berasal dari lereng Gunung Kawi.

Berdasarkan ruang lingkup pembangunan tersebut maka strategi yang digunakan oleh pemerintah Desa Jedong yang dalam konteks ini adalah Kepala Desa Jedong adalah ingin mewujudkan pembangunan sesuai dengan strategi kesejahteraan (*The Welfare Strategy*) yang dikemukakan oleh Adisasmita (2013:76) pada poin dua (2) dan strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*The Responsive Strategy*) yang terdapat pada poin tiga. (3). Strategi tersebut dapat dikatakan berhasil karena masyarakat Desa Jedong dapat menerima manfaat pembangunan meterisasi air tersebut.

Manfaat yang diperoleh masyarakat sesuai dengan strategi kesejahteraan adalah dengan dibangunnya meterisasi air ini maka masyarakat dapat memperbaiki kesejahteraan atau taraf hidupnya yaitu berupa peningkatan kesehatan yang dialami oleh masyarakat Jedong dikarenakan pasokan air bersih terus ada dan dialirkan ke rumah warga secara langsung terlebih air yang didapatkan tergolong air yang bersih dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi,

mencuci, dan sebagainya. Manfaat lainnya adalah tingkat ekonomi yang meningkat, karena dengan adanya pembangunan meterisasi air ini beberapa warga dapat membangun usaha untuk meningkatkan perekonomiannya seperti usaha budidaya ikan lele dan usaha cuci motor, terlepas dari sebagian besar masyarakat Desa Jedong adalah petani dan buruh pabrik.

Pembangunan meterisasi air yang memperhatikan strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat juga memberikan manfaatnya secara langsung yaitu penyediaan air yang dahulunya sulit untuk didapatkan oleh warga sekarang menjadi mudah dan tidak perlu lagi menampung air pada jam-jam tertentu. Sehingga air dapat digunakan oleh warga dalam memenuhi kebutuhannya kapan saja. Dan bentuk partisipasi yang nyata setelah masyarakat menerima berbagai manfaat dari pembangunan meterisasi air itu adalah keikutsertaan dari semua warga Desa Jedong untuk mampu melakukan pengelolaan meterisasi air tersebut dengan baik, disamping juga ditunjang dengan pemberian dana iuran tiap bulannya.

**d) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan meterisasi air.**

Setelah program pembangunan dilaksanakan, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah mengevaluasi dengan cara memberikan pengawasan. Pengawasan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan untuk menilai kinerja bawahan. Namun pengawasan

juga dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpin untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang telah dilaksanakannya tersebut sudah sesuai dan berjalan dengan lancar.

Bentuk partisipasi masyarakat yang bertingkat menurut Maskun dalam Solekhan (2014:164) pada poin tiga (3) yaitu tertampungnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Sesuai dengan hal tersebut kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Desa Jedong untuk membangun meterisasi air ini agar kepentingan warga terhadap air bersih dapat terpenuhi. Namun pada pelaksanaannya ternyata masih saja ditemui beberapa masalah seperti distribusi air yang tidak merata karena besarnya aliran air kecil berbeda antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Selain itu permasalahan lainnya adalah aliran air di beberapa rumah warga terputus sehingga tidak teraliri oleh air dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh warga yang aliran airnya bermasalah kepada panitia dusun setempat saat melakukan penarikan iuran rutin bulanan.

Berdasarkan hal tersebut Sanim, (2011:18-19) mengelompokkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya pengelolaan sumberdaya air dan permasalahan pengelolaan air tersebut yang sesuai dengan masalah Desa Jedong adalah pada poin (f) tentang distribusi pelayanan air yang tidak merata dan pada poin (i) yaitu berkurangnya persediaan air bersih disebabkan berkurangnya daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan.

Hal tersebut ternyata sudah didiskusikan oleh panitia pelaksanaan pembangunan meterisasi air kepada kepala desa setempat. Kemudian ditemukan ditemukan penyelesaian untuk masalah penyaluran distribusi yang tidak merata disebabkan pemasangan pipa yang tidak baik sehingga menyebabkan bentrok atau aliran air mati. Setelah dikritik oleh warga permasalahan tersebut telah diperbaiki dengan melakukan penggalian ulang untuk membetulkan posisi pipa. Sedangkan untuk evaluasi yang disampaikan warga berkaitan dengan besar kecilnya aliran air tersebut Kepala Desa Jedong mengatakan debit air terkadang kecil disebabkan aliran air dari mata air sumber berkurang bisa disebabkan oleh musim atau penggunaan lahan untuk bangunan dekat dengan wilayah sumber tersebut dan sampai saat ini masih ditinjau oleh Kepala Desa Jedong.

### **3. Kendala-Kendala yang Dihadapi untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Meterisasi Air**

Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila adanya rasa saling percaya antara *stakeholders* terkait. Namun penciptaan kondisi saling percaya tersebut tidak dapat tumbuh begitu saja dalam masyarakat karena diperlukan waktu yang cukup lama bahkan tidak terbatas. Oleh sebab itu muncul beberapa kendala-kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kendala-kendala tersebut dapat berupa faktor internal meliputi, komunikasi dan gaya kepemimpinan serta faktor eksternal yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

### a. Kendala Internal

Kendala internal yang terlihat dari pembangunan meterisasi air ini adalah komunikasi. Kendala komunikasi ini terlihat dari proses pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong terhadap masyarakat setempat. Saat pertama kali memberikan pengarahan kepala desa merasa kesulitan dikarenakan beberapa masyarakat belum mengerti pentingnya pembangunan dan manfaat program pembangunan meterisasi air bagi desa dan masyarakat itu sendiri. Proses pengarahan dilakukan dengan cara memberikan pengertian kepada masyarakat setempat sehingga dengan begitu diharapkan masyarakat menjadi paham terhadap program pembangunan yang telah dibuat dan pada akhirnya mereka turut berpartisipasi di dalamnya.

Pelaksanaan Koordinasi tentunya juga memerlukan suatu komunikasi yang baik di dalamnya. Dalam hal ini Kepala Desa Jedong tidak mengalami kendala yang cukup besar dalam membentuk susunan panitia di tingkat desa maupun tingkat dusun. Untuk pembentukan panitia di tingkat desa kendala komunikasi tidak terlihat karena terdiri dari perangkat desa dan perwakilan lembaga desa sehingga, banyak dari mereka yang telah paham

mengenai tugas yang diberikan. Untuk pembentukan panitia di tingkat dusun pun sebenarnya tidak sulit karena telah terkoordinasi sesuai dengan RT dan RW setempat.

Kendala komunikasi berikutnya terlihat dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemimpin. Saat melakukan pengambilan keputusan, Kepala Desa Jedong menggunakan gaya demokratis yang melibatkan seluruh perangkat desa dan masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar keputusan dalam melaksanakan pembangunan meterisasi air ini dapat berjalan dengan lancar. Komunikasi dengan masyarakat pada awalnya sulit dikarenakan kembali lagi kepada masyarakat yang belum memahami pentingnya pembangunan meterisasi ini, dan tidak semua masyarakat berkeinginan untuk memasang alat meterisasi di rumahnya karena peralatan harus dipenuhi secara swadaya oleh masyarakat dan tidak sepenuhnya berasal dari desa.

Dalam hal pemberian pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jedong, terlihat proses komunikasi yang jauh lebih baik dari tahap-tahap sebelumnya pada awal pelaksanaan dan saat pelaksanaan pembangunan meterisasi air. Karena pada tahap ini masyarakat mulai mengerti manfaat dari pembangunan meterisasi air dan partisipasi masyarakat pun bertambah. Sehingga dalam tahap ini seorang pemimpin hanya perlu mempertahankan

partisipasi masyarakat dan komunikasi yang baik untuk mendukung jalannya pembangunan berikutnya.

Jadi, secara keseluruhan dalam hal pembangunan meterisasi air ini faktor komunikasi pada awalnya tidak berjalan dengan lancar dikarenakan ketidaktahuan warga akan manfaat dari penggunaan meteran dan pembangunan meterisasi itu sendiri. Sehingga sebelum pelaksanaan program pembangunan, Kepala Desa Jedong memberikan penjelasan mengenai pentingnya pembangunan meterisasi air karena dapat mempermudah kegiatan warga dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari tanpa adanya kecurangan-kecurangan dari pihak-pihak terkait dalam pengambilan air saat sebelum alat meteran dipasang. Dengan adanya komunikasi yang baik tersebut akhirnya pembangunan meterisasi air ini mendapat dukungan dan dapat dimengerti manfaatnya oleh warga Desa Jedong.

#### **b. Kendala Eksternal**

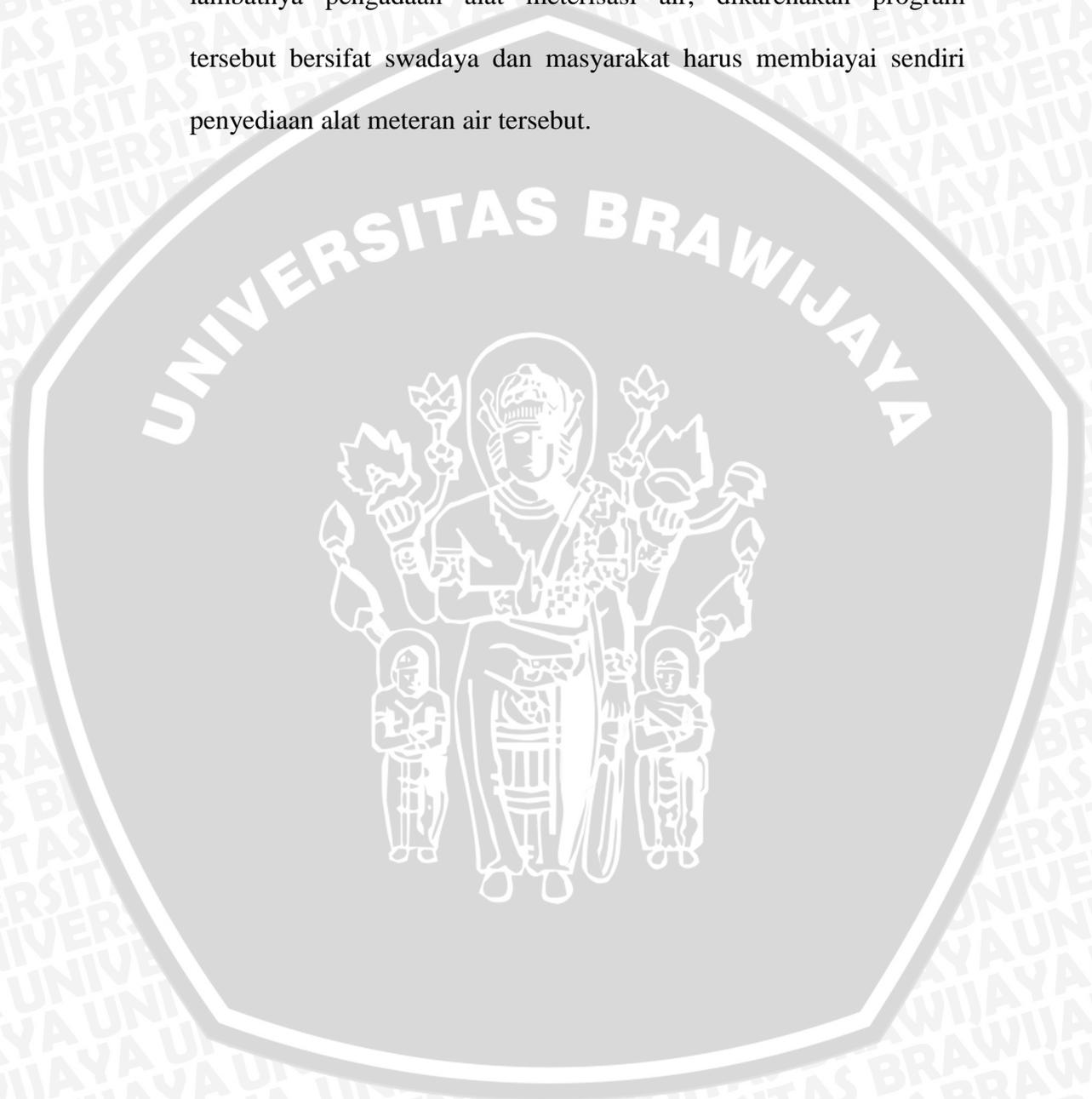
Kendala eksternal yang terlihat dalam pelaksanaan pembangunan meterisasi air ini disebabkan oleh faktor pendidikan dan tingkat pendapatan masyarakat Desa Jedong. Desa Jedong sebagian besar penduduknya berpendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar bahkan ada juga yang masih belum mengenyam bangku pendidikan. Hal itu menyebabkan tingkat komunikasi tidak lancar dikarenakan sebagian besar dari warga tidak mengerti apa

yang disampaikan oleh Kepala Desa pada saat adanya rapat RKPDesa maupun rencana-rencana yang disampaikan oleh panitia desa dalam rapat RT mengenai program meterisasi air ini. Untuk itu kembali lagi pada komunikasi yang harus dilakukan secara intens dan mendalam dengan memberikan penjelasan sehingga warga dapat mengerti maksud dan tujuan diadakannya pembangunan meterisasi air ini.

Kendala berikutnya adalah tingkat pendapatan masyarakat Desa Jedong, tingkat pendapatan masyarakat Jedong yang cenderung rendah tidak terlepas dari tingkat pendidikannya yang juga tergolong rendah. Karena hal itulah maka beberapa warga di Desa Jedong masih ada yang belum melakukan pemasangan alat meteran dikarenakan beberapa diantara mereka masih ada yang merasa keberatan dalam membeli alat meterisasi air ini sebab biaya yang menurutnya cukup menjadi beban. Untuk itu mereka memilih mengangsur pembelian alat meteran ini kepada panitia tingkat dusun atau Ketua RT setempat, sehingga hal tersebutlah yang menjadi penyebab lamanya pembangunan meterisasi air ini.

Ketiga kendala tersebut saling berkaitan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berakibat pada terhambatnya proses komunikasi dari kepala desa kepada masyarakat setempat, yang mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan program-program pembangunan desa. Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya

pelaksanaan program pembangunan meterisasi air ini adalah minimnya pendapatan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan lambatnya pengadaan alat meterisasi air, dikarenakan program tersebut bersifat swadaya dan masyarakat harus membiayai sendiri penyediaan alat meteran air tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipatif di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang” dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fokus-fokus penelitian yang ada sebagai berikut:

#### 1. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipatif

Setiap pemimpin dalam kegiatan kepemimpinannya selalu memiliki gaya masing-masing, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Jedong adalah gaya kepemimpinan yang Demokratis. Hal tersebut terlihat dalam cara-caranya ketika:

- a. Pemberian pengarahan program pembangunan meterisasi air Kepala Desa Jedong mampu untuk mendorong dan memotivasi bawahan dan masyarakat sehingga tergerak untuk turut serta kedalam pembangunan meterisasi air.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi Kepala Desa Jedong dengan cara membentuk panitia pelaksanaan pembangunan meterisasi air ditingkat desa dan dusun serta membebaskan

pemilihan orang-orang yang ada dalam kelompok panitia tersebut dan memberikan kesempatan kepada panitia untuk menyusun sendiri struktur organisasinya asalkan semua tugas bisa terkordinir dan dapat dikomunikasikan dengan baik.

- c. Pengambilan keputusan oleh kepala desa dengan melibatkan masyarakat setempat dalam musyawarah desa dengan mendengarkan semua keluhan-keluhan, kesulitan warga dan ide ataupun usulan yang berkaitan dengan pengadaan air.
- d. Pemberian pengawasan oleh Kepala Desa Jedong dilakukan dengan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan meterisasi air dan menugaskan panitia pelaksanaan meterisasi air untuk membuat laporan iuran air bersih setiap 6 bulan sekali.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Meterisasi**

### **Air**

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan program pembangunan meterisasi air dengan memberikan ide dan usulan serta pendapat dalam musyawarah RKP-Desa.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan meterisasi air dengan memberikan sumbangan ide atau gagasan, sumbangan materi berupa dana yang diberikan secara sukarela untuk pembelian alat, sumbangan tenaga dalam pemasangan alat meterisasi.

- c. Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat pembangunan meterisasi air yaitu turut serta dalam pengelolaan meterisasi air dengan cara membayar iuran secara rutin.
- d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan meterisasi air dengan cara mengingatkan ataupun menegur apabila ada kendala dalam proses distribusi air.

### **3. Kendala-Kendala yang Dihadapi untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Meterisasi Air**

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan meterisasi air ini ditemukan beberapa kendala antara lain:

#### **a. Kendala Internal**

Kendala internal yang terlihat dalam pembangunan meterisasi air di Desa Jedong adalah komunikasi pada proses pengarahan dan pengambilan keputusan karena beberapa dari masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti manfaat pembangunan meterisasi air.

#### **b. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal yang terlihat adalah rendahnya pendidikan masyarakat dan juga tingkat pendapatan dikarenakan menghambat proses komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin sebab kurang pemahannya masyarakat terhadap program pembangunan. Tingkat pendapatan juga merupakan kendala karena penyediaan alat dilakukan secara swadaya dan bagi warga yang memiliki tingkat

pendapatan rendah maka pengadaan alat meteran tersebut dirasa cukup menjadi beban bagi mereka.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Meterisasi Air Berbasis Partisipatif di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang” maka peneliti akan memberikan saran dan rekomendasi yang diharapkan mampu memberikan masukan positif bagi semua pihak yang berkepentingan didalamnya.

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi pemimpin, diharapkan untuk tetap menjaga komunikasi yang baik terhadap semua perangkat desa dan seluruh masyarakat. Karena dengan komunikasi yang baik, proses pengarahan mengenai program pembangunan dapat tersampaikan dengan jelas dan sekaligus dimengerti oleh masyarakat, begitu pula dalam proses pengoordinasian, pengambilan keputusan dan pengawasan. Untuk itu agar komunikasi dapat berjalan dua arah maka perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan terlebih dahulu.
2. Bagi masyarakat Desa Jedong, diharapkan untuk tetap turut berpartisipasi terhadap semua kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh kepala desa. Karena dengan ikut berpartisipasi dan menyumbangkan gagasan serta kritik diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kepentingan warga setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arifin, Syamsul. 2012. *LEADERSHIP, Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD)
- Darmadi, Damai dan Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo
- Dimiyati, H.A. Hamdan. 2014. *Model Kepemimpinan dan Sistem Pengambilan Keputusan*. Bandung: Pustaka Setia
- Sashkin, Marshall dan Molly G. Sashkin. 2011. *Prinsip-Prinsip Kepemimpinan*. Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: P.T Bina Aksara
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sanim, Bunasor. 2011. *Sumberdaya Air dan Kesejahteraan Publik*. Bogor: IPB Press
- Saparin, Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sashkin, Marshall dan Molly G. Sashkin. 2011. *Prinsip-Prinsip Kepemimpinan (Leadership That Matters)*. Jakarta: Erlangga
- Setyowati. 2013. *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: P.T. RINEKA CIPTA
- Simbolon, Maringan Marsy. 2004. *Dasar-Dasar Adiministrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syafii, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Utaminingsih, Alifulahtin. 2014. *Perilaku Organisasi (Kajian Teoritik dan Empirik terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen)*. Malang: UB Press

#### **JURNAL:**

- Chaerunnissa, Chika. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*. UNDIP: Ejournal.undip.ac.id
- Christiani, Irenna. 2014. *Implementasi Pengadaan Air Bersih pada Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat*. UB: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Karauwan, Richard O. 2013. *Tinjauan tentang Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa*. UNSRAT: Ejournal.unsrat.ac.id
- Silalahi, Ulbert. 2012. *Kepemimpinan Pemerintah Desa dalam Pembangunan*. Perpustakaan Universitas Indonesia: lib.ui.ac.id

#### **WEBSITE:**

- Environmental Health Risk Assesment. *Program Pengembangan Sanitasi Bab IV*. Diakses pada tanggal 24 Juli 2016 pada [www.fasilitatorsanitasi.org](http://www.fasilitatorsanitasi.org)
- Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Renja Wagir 2015*. Diakses pada tanggal 19 Juli 2016 pada <http://wagir.malangkab.go.id/>
- Kusairi, Ghaza. 2011. *Kepemimpinan, Manajemen, Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Diakses pada 15 Juli 2016 pada [www.wordpress.com/weblog](http://www.wordpress.com/weblog)
- Megani, Anggia. 2011. *Hubungan Antara Kepemimpinan, Manajemen dan Administrasi*. Diakses pada 15 Juli 2016 pada <http://anggia-megani.blogspot.co.id/>

Pemerintah Kabupaten Malang. *Profil Kabupaten Malang*. Diakses pada tanggal 23 Juli 2016 pada <http://malangkab.go.id/>

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman. *Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Malang*. Diakses pada 23 Juli 2016 pada <http://PPSP.nawasis.info/>

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman. *Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa*. Diakses pada 23 Juli 2016 pada <http://PPSP.nawasis.info/>

Telecenter Mawar Putih. 2010. *Data Dasar Profil Desa Jedong Kecamatan Wagir*. Diakses pada 14 Agustus 2016 pada <https://telecentermawarputih.wordpress.com/desaku/>

Peta Kota. *Peta Kabupaten Malang*. Diakses pada 23 Juli 2016 pada <http://peta-kota.blogspot.com>

Peta Desa Jedong. Diakses pada 24 Juli 2016 pada [www.google.co.id/maps](http://www.google.co.id/maps)

Rinaldhi. 2010. Fungsi Controlling (Pengawasan dan Pengendalian). Diakses pada 15 Agustus 2016 pada <http://rheinduniatulisn.blogspot.com/>

#### **DOKUMEN:**

Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Wagir Desa Jedong. *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)*. Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Wagir Desa Jedong. *Profil Desa Jedong*. Tahun 2010

#### **PERATURAN-PERATURAN:**

Peraturan Desa Jedong Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat 3 tentang Sumber Daya Alam

UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi dan Pemerintah Daerah

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

## LAMPIRAN

**Lampiran 1: Foto Kantor Kepala Desa Jedong**



**Lampiran 2: Foto Kantor Kepala Desa Jedong Tampak Depan**



Lampiran 3: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jedong



Lampiran 4: Hasil Pemasangan Meterisasi di Salah Satu Rumah Warga



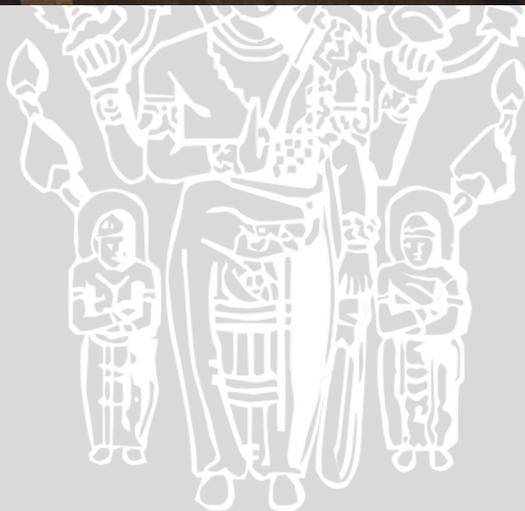
**Lampiran 5: Alat Meteran yang Digunakan oleh Warga Tampak dari Dekat**



**Lampiran 6: Tandon Air di Desa Jedong**



### Lampiran 7: Pipa Kontrol Air untuk Penyediaan Air Warga



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Desa memiliki fungsi dan tugas dalam pemerintahan desa, tolong Bapak jelaskan sejauh mana tugas dan fungsi tersebut sudah Bapak laksanakan sebagai Kepala Desa Jedong ?
2. Bagaimana gaya kepemimpinan yang Bapak terapkan dalam program pembangunan meterisasi air di Desa Jedong ?
3. Sejauh ini bagaimanakah hubungan antara Bapak selaku Kepala Desa Jedong dengan masyarakat ?
4. Pendekatan seperti apakah yang Bapak lakukan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan meterisasi ?
5. Bagaimanakah cara Bapak untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat dan perangkat dalam program meterisasi air ?
6. Bagaimanakah cara Bapak memberikan pengertian dan pengarahan kepada warga desa mengenai program meterisasi air ini ?
7. Bagaimanakah cara Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai program pembangunan meterisasi air di Desa Jedong ?
8. Bagaimanakah cara Bapak memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan meterisasi air ini baik kepada panitia maupun masyarakat ?
9. Dalam bentuk apa saja masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan meterisasi air di Desa Jedong ?
10. Apakah seluruh masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan meterisasi air ini ?
11. Apa sajakah kendala-kendala dalam pembangunan meterisasi air sebagai sarana pengadaan air bersih bagi warga ?

**CURICULLUM VITAE****Identitas Diri**

Nama Lengkap : Verra Ratih Kriswahyuni

NIM : 115030101111105

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 26 Januari 1993

Alamat Asal : Malang

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Hobi : Mendengarkan Musik

**Riwayat Hidup**

- 1999-2005 : SDN Bareng 3 Malang
- 2005-2008 : SMPN 6 Malang
- 2008-2011 : SMAN 2 Malang
- 2011-2016 : Mahasiswa FIA UB, Malang

